

**STUDI UPAYA PEMENUHAN FASILITAS PERSAMPAHAN
PADA KAWASAN PERUMAHAN
DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG**

RINGKASAN TESIS

Oleh:

**NUR KHOIRI
L 4D002173**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

**STUDI UPAYA PEMENUHAN FASILITAS PERSAMPAHAN
PADA KAWASAN PERUMAHAN
DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG**

RINGKASAN TESIS

Oleh:

**NUR KHOIRI
L 4D002173**

PEMBIMBING I :

Ir. Nany Yuliasuti, MSP

PEMBIMBING II :

Ir. Mardwi Rahdriawan, MT



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

**STUDI UPAYA PEMENUHAN FASILITAS PERSAMPAHAN
PADA KAWASAN PERUMAHAN
DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Oleh :
NUR KHOIRI
L4D002173

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal, 4 Maret 2006

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 4 Maret 2006

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Ir. Nany Yuliasuti, MSP

Ir. Mardwi Rahdriawan, MT

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan/magister disuatu perguruan tinggi. Sepanjang sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 4 Maret 2006

Nur Khoiri
NIM L4D002173

*Sehingga Rakyat Langsung Tahu,
Dia Memilih dan Berurusan dengan Siapa.
Bukan Hanya dengan Partai atau Organisasi mana,
tetapi dengan SIAPA.*

*Pemilih dan yang Dipilih pada Hakikatnya Berelasi
Bukan hanya sebagai Barang atau Perkara atau Organisasi Abstrak,
tetapi Selaku Obyek Manusiawi,
bukan Obyek Proyek.*

(Mangunwijaya, YB, Gerundelan Orang Republik, hal.326)

*Tesis ini kupersembahkan kepada :
Orang Tua,
Kakak-kakak tercinta
Semoga persembahan ini dapat memberikan
kebanggaan dan kebahagiaan untuk selamanya*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas tersusunnya laporan tesis ini. Penyusunan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Teknik pada Program Pasca Sarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan Tesis dengan judul “*Studi Upaya Pemenuhan Fasilitas Persampahan pada Kawasan Perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*” ini, penulis memperoleh bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih. Kepada :

1. Prof. Dr. Ir Sugiono Soetomo, DEA, selaku Ketua Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota,
2. Ir. Nany Yuliasuti, MSP , selaku Mentor,
3. Ir. Mardwi Rahdriawan, MT., selaku Co – Mentor,
4. Ir. Parfi Khadiyanto, MSL sebagai dosen Pembahas dan Penguji I,
5. Ir. Titien Woro Murtini, MS sebagai Dosen Penguji II,
6. Orang Tua, dan Kakak-kakakku yang telah dengan memberi dorongan moral dan material dalam penyusunan tesis ini,
7. Dr. Rasdi Ekosiswoyo M.Sc Yang banyak membantu penulis
8. Teman-teman AP-3, saudara-saudaraku di IKIP PGRI Semarang, REW dan EDU Consultans
9. Bagian pengajaran MPWK (Mbak Ratih, Didin, Linda, Pak Janu, Mas Nur, Mas Supri),
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Akhirnya, dengan menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa hasil tesis ini jauh dari sempurna, maka penulis mempersembahkan tesis ini untuk mendapatkan penilaian, koreksi dan penyempurnaan lebih lanjut.

Semarang, 4 Maret 2006

Penyusun

Nur Khoiri

ABSTRAK

Pertumbuhan jumlah penduduk di perkotaan yang cepat dan dinamis sebagai akibat tingginya angka kelahiran dan tarikan ekonomi perkotaan menyebabkan kebutuhan perumahan juga meningkat. Kebutuhan perumahan tersebut merupakan sebuah peluang bagi pengembang untuk memenuhinya. Pengembang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembang yang membangun perumahan dengan skala kecil yaitu berupa kelompok-kelompok kecil, karena Pembangunan perumahan dalam skala ini sering tidak dilengkapi dengan fasilitas umum termasuk fasilitas persampahan.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan mengambil enam perumahan yaitu; Gria Arteri Sari, Medoho Asri, Medoho Indah, Pondok Indah, Pedurungan Baru dan Graha Mutiara. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya pemenuhan fasilitas persampahan pada perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposif Random, dengan teknik deskriptif kualitatif.

Selanjutnya dalam studi ini dibatasi ruang lingkup pembahasan substansial pada tiga hal, yaitu: a). Analisis Kondisi Fisik Perumahan, b). Analisis pemenuhan dan penanganan persampahan, dan c). Analisis peran serta masyarakat dalam upaya penyediaan fasilitas persampahan yang meliputi analisis persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, analisis faktor sosial ekonomi masyarakat perumahan setempat dan analisis peran serta pemerintah.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi perumahan merasa mengalami persoalan yang sama yaitu tentang pengelolaan sampah, munculnya ide awal untuk membentuk sistem pengelolaan sampah antara satu perumahan dengan perumahan yang lainnya bervariasi. Diseluruh lokasi penelitian awalnya warga membuang sampah mereka secara individu, dan ketika penghuni perumahan semakin banyak mulai muncul persoalan sampah, sehingga mulai terbangun komunikasi antara sesama warga untuk mengatasi masalah tersebut. Di perumahan Pedurungan Baru dan Pondok Indah ide awal untuk mengelola berasal dari kelurahan, sedangkan Gria Arteri Sari, Medoho Asri, Medoho Indah, dan Graha Mutiara idenya berasal dari warga. Meskipun munculnya ide yang mendorong adanya sistem pengelolaan sampah bervariasi, tetapi pelaksanaan pengelolaan sampah antar perumahan relatif sama. Sampai sekarang pengelolaan sampah masih belum bisa optimal salah satunya disebabkan karena rendahnya upah yang diterima oleh petugas pengangkut.

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah a). Perlu adanya peraturan yang jelas tentang fasilitas umum persampahan yang harus dibangun oleh pengembang dengan skala kecil. (b) Perlu dibuat Sub TPS di lokasi perumahan skala kecil, agar sistem pengelolaannya lebih mudah dan ekonomis (c) Perlu disusunnya program-program yang dapat dilaksanakan RT/RW dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. (d) Perlunya penambahan sarana dan prasarana dalam upaya pengelolaan sampah, seperti truck pengangkut, gerobak sampah dan tong sampah.

Kata Kunci: *Upaya Pemenuhan, Fasilitas Persampahan, dan Kawasan Perumahan.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Lembar Pengesahan	II
Lembar Pernyataan	III
Lembar Persembahan	IV
Abstrak	V
Kata Pengantar	VI
Daftar Isi	VII
Daftar Tabel	IX
Daftar Gambar	X
Daftar Lampiran	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Sasaran	4
1.3.1 Tujuan	4
1.3.2 Sasaran	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial	5
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial	6
1.4.3 Kedudukan Penelitian	8
1.5 Kerangka Pikir Penelitian	8
1.6 Metodologi Studi	12
1.7 Sistematika Pembahasan	20
BAB II FASILITAS PERSAMPAHAN PADA KAWASAN PERUMAHAN	23
2.1 Pembangunan Perumahan	23
2.2 Fasilitas Persampahan	35
2.2.1 Penggolongan dan Karakteristik Sampah	36
2.2.2 Pengertian Pengelolaan dan Penanganan Sampah	39
2.2.3 Komponen-komponen Pengelolaan dan Penanganan Sampah	40
2.2.4 Swastanisasi Sampah	47
2.3 Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan	48
2.3.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	48
2.3.2 Langkah-langkah Penanganan Pemberdayaan	49
2.3.3 Metode yang digunakan dalam Penanganan Pemberdayaan	50
2.4 Ringkasan Kajian Teori	54
BAB III KAWASAN PERUMAHAN DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG	56
3.1 Perkembangan Kecamatan Pedurungan Terhadap Kota Semarang	56

3.1.1 Administrasi dan Fisik Alami	56
3.1.2 Demografi dan Sosial Budaya	56
3.2 Pola Pemenuhan Fasilitas Umum Persampahan	59
3.3 Kawasan Perumahan di Kecamatan Pedurungan	65
3.3.1 Perumahan Gria Arteri Sari	65
3.3.2 Perumahan Medoho Indah	69
3.3.3 Gria Medoho Asri	73
3.3.4 Perumahan Pedurungan Baru	76
3.3.5 Perumahan Graha Mutiara Semarang	79
3.3.6 Perumahan Pondok Indah	82
BAB IV ANALISIS UPAYA PEMENUHAN FASILITAS PERSAMPAHAN KAWASAN PERUMAHAN DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG	86
4.1 Analisis Kondisi Fisik Perumahan	86
4.2 Analisis Fasilitas Persampahan	87
4.2.1 Analisis Kondisi Umum Pelayanan Persampahan	87
4.2.2 Analisis Pelayanan Persampahan di kecamatan Pedurungan	94
4.2.3 Analisis Peran Serta Masyarakat	104
4.3 Temuan Penelitian	113
BAB V PENUTUP	117
5.1 Kesimpulan	117
5.2 Rekomendasi	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jumlah penduduk dan kualitas penduduk perkotaan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cepat dan dinamis. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan percepatan pertumbuhan penduduk kota (Jones, 1988) adalah penambahan penduduk secara alami, migrasi serta adanya perluasan areal perkotaan. Perkembangan penduduk yang cepat tersebut membawa pada konsekuensi peningkatan kebutuhan akan tempat hunian, seperti ketersediaan akan perumahan.

Kebutuhan akan perumahan merupakan hak mendasar sebagai warga negara. Untuk melayani peningkatan kebutuhan perumahan telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta khususnya dalam pengadaan perumahan berikut prasarana lingkungan. Pembangunan kawasan perumahan yang dibangun oleh *developer* harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas, seperti fasilitas umum maupun fasilitas sosial sesuai dengan izin membangun perumahan yaitu izin lokasi, persyaratan dari Badan Pertanahan Nasional (Permendagri No.1 tahun 1987).

Fenomena yang muncul saat ini terutama di Kota Semarang, adalah munculnya banyak *developer* atau pengembang, baik yang bersifat *corporate* ataupun individu yang membangun perumahan yang tersebar di seluruh wilayah administrasi Kota Semarang, tidak terkecuali pada wilayah administrasi Kecamatan Pedurungan. Pembangunan perumahan tersebut dibangun oleh berbagai pihak, baik pengembang dengan skala besar maupun kecil.

Menurut pengamatan penulis di lapangan dan fenomena yang muncul pada kondisi sekarang, pembangunan perumahan oleh pengembang skala besar menggunakan luasan lahan lebih dari 1 hektar serta dengan jumlah unit rumah lebih dari 100 buah. Sedangkan perumahan yang dibangun oleh pengembang kecil, adalah pembangunan perumahan oleh developer atau perorangan dengan luasan area kurang dari 1 hektar serta jumlah rumah kurang lebih dari 100 unit rumah.

Kondisi yang ada di lapangan menunjukkan pembangunan kawasan perumahan oleh pengembang kecil tersebut sering tidak menyediakan fasilitas umum maupun sosial, khususnya persampahan. Fasilitas persampahan di sini mengandung arti suatu aktifitas ataupun materi yang berfungsi melayani kebutuhan pengelolaan masalah sampah yang meliputi, pewadahan, pengangkutan, pengumpulan dan pembuangan akhir sampah.

Fenomena tersebut terjadi pada perumahan yang dibangun oleh pengembang kecil di daerah Kecamatan Pedurungan, antara lain yaitu perumahan Gria Arteri Sari, Medoho Asri, Medoho Indah, Pondok Indah, Pedurungan Baru. Pada perumahan-perumahan ini pengelolaan persampahannya sangat bervariasi, mulai dari operasional dan manajemen sampai dengan peran serta masyarakat penghuninya. Untuk pola operasionalnya berdasarkan pengamatan di lapangan masing-masing perumahan mempunyai karakteristik yang berbeda. Misalnya, untuk pola pewadahnya, ada yang menggunakan ban bekas seperti perumahan; Pondok Indah, Pedurungan Baru dan Medoho Indah. Perumahan-perumahan tersebut dibangun sudah cukup lama, sehingga jumlah wadah sampah yang ada relatif banyak dibandingkan dengan jumlah rumahnya tetapi kondisi fisiknya kurang baik. Hal ini disebabkan karena faktor umur dan kurangnya perawatan.

Perumahan Gria Arteri Sari, dan Medoho Asri menggunakan jenis pewadahan sampah dari bin plastik. jumlah wadah sampah yang ada relatif sedikit dimungkinkan karena penghuni yang ada belum banyak, sehingga kondisi fisik wadah sampah juga masih baik.



Foto Desember 2006

GAMBAR 1.1
LAHAN KOSONG DI PERUMAHAN MEDOHO INDAH
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT MEMBUANG SAMPAH

Sedangkan untuk peran serta masyarakat, masing-masing perumahan juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Upaya-upaya pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan persampahan bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang berperan dalam upaya pengelolaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan adanya fenomena tentang pembuangan sampah yaitu masih ada warga yang rumahnya tidak memiliki wadah sampah, hal ini terlihat pada perumahan Medoho Indah. Akibatnya karena ada lahan kosong di lokasi perumahan Medoho Indah tersebut, ada warga yang masih membuang dan membakar sampahnya, karena dinilai jauh lebih cepat dan ekonomis. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di lingkungan perumahan medoho Indah kurang baik karena kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat setempat.

1.2 Perumusan Masalah

Pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang kecil seringkali tidak memperhatikan beberapa prasarana lingkungan yang ada, seperti fasilitas sosial dan fasilitas umum, antara lain yaitu fasilitas *playground*, taman, dan terutama fasilitas

persampahan. Fasilitas persampahan yang meliputi, pewadahan, pengangkutan, pengumpulan dan pembuangan akhir dari sampah tersebut.

Fenomena ini terjadi pada perumahan yang dibangun pengembang kecil di daerah Kecamatan Pedurungan, antara lain yaitu perumahan Gria Arteri Sari, Medoho Asri, Medoho Indah, Pondok Indah, Pedurungan Baru dan Graha Mukti Asri. Dari latar belakang permasalahan tersebut maka *Research Question* yang diambil adalah ***bagaimana upaya dalam memenuhi fasilitas persampahan pada perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?***

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya-upaya pemenuhan fasilitas persampahan pada perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Sasaran yang ingin dicapai daam peneliti ini adalah:

- Mengidentifikasi kondisi fisik perumahan Perumahan Gria Arteri Sari, Medoho Asri, Medoho Indah, Pondok Indah, Pedurungan Baru dan Graha Mutiara di Kecamatan Pedurungan,
- Mengidentifikasi tingkat sosial ekonomi penghuni perumahan perumahan Gria Arteri Sari, Medoho Asri, Medoho Indah, Pondok Indah, Pedurungan Baru dan Graha Mutiara dalam kaitannya akan kebutuhan fasilitas persampahan pada kawasan perumahan di wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

- Menganalisis peran serta masyarakat (*community development*) dalam upaya pemenuhan fasilitas persampahan pada kawasan perumahan perumahan Gria Arteri Sari, Medoho Asri, Medoho Indah, Pondok Indah, Pedurungan Baru dan Graha Mutiara Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- Menganalisis fasilitas persampahan yang ada di perumahan perumahan Gria Arteri Sari, Medoho Asri, Medoho Indah, Pondok Indah, Pedurungan Baru dan Graha Mutiara yang meliputi: analisis jenis sampah, analisis produksi sampah, dan analisis komponen-komponen dalam pengelolaan dan penanganan sampah,

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Ligkup Substansial

Tema studi berjudul “*Studi Upaya Pemenuhan Fasilitas Persampahan pada Kawasan Perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*” diarahkan pada kajian tentang fenomena perkembangan perumahan di Kota Semarang yang dibangun oleh sektor informal, yaitu fenomena di lapangan dimana *developer* atau perorangan membangun kawasan perumahan dengan luas lokasi kurang dari 1 hektar atau unit rumah kurang dari 60 unit rumah. Kondisi ini terjadi di Kecamatan Pedurungan, antara lain di perumahan Gria Arteri Sari, Medoho Asri, Medoho Indah, Pondok Indah, Pedurungan Baru, dan Graha Mutiara Semarang.

Selanjutnya dalam studi ini dibatasi ruang lingkup pembahasan substansial pada tiga hal, yaitu:

Analisis Kondisi Fisik Perumahan

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis/tipe hunian di perumahan dan keterkaitan lokasi perumahan dengan struktur kota.

Analisis pemenuhan dan penanganan persampahan pada perumahan di wilayah Kecamatan Pedurungan

Analisis ini meliputi analisis jenis sampah yang dihasilkan, analisis jumlah produksi sampah, dan analisis komponen-komponen dalam pengelolaan dan penanganan sampah.

Analisis peran serta masyarakat dalam upaya penyediaan fasilitas persampahan pada kawasan yang dibangun

Analisis ini meliputi analisis persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, analisis faktor sosial ekonomi masyarakat perumahan setempat dan analisis peran serta pemerintah.

1.4.2 Ruang Lingkup Spatial

Ruang lingkup spatial yang dimaksudkan adalah kawasan perumahan yang dibangun oleh sektor informal di wilayah administrasi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, meliputi Perumahan Gria Arteri Sari, Medoho Asri, Medoho Indah, Pondok Indah, Pedurungan Baru, dan Graha Mutiara. Selanjutnya ruang lingkup spatial tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 Peta ruang lingkup “*Studi Upaya Pemenuhan Fasilitas Persampahan pada Kawasan Perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*”.

1.4.3 Kedudukan Penelitian

Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah :

Persepsi masyarakat dan petugas kebersihan dalam upaya peningkatan optimalisasi pengelolaan sampah domestik di kota Tanjung pinang, yang dilakkan oleh Tengku Dahlan, 2005. penelitian ini menitik beratkan pada mencari faktor penyebab terjadinya timbunan sampah serta faktor yang mempengaruhi para petugas dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan sampah.

Perilaku pengumpul sampah rumah tangga di kota Depok kab. Sleman. Ole Dani Anta Sudibya, 2002; bertujuan untuk meneliti perilaku pengumpul sampah dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, Ni Made Sunarti, 2002; bertujuan meneliti tingkat peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Studi upaya pemenuhan fasilitas persampahan pada kawasan perumahan di kecamatan pedurungan kota semarang, 2006; bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan fasilitas persampahan pada perumahan di kecamatan pedurungan kota Semarang

1.5 Kerangka Pikir Penelitian

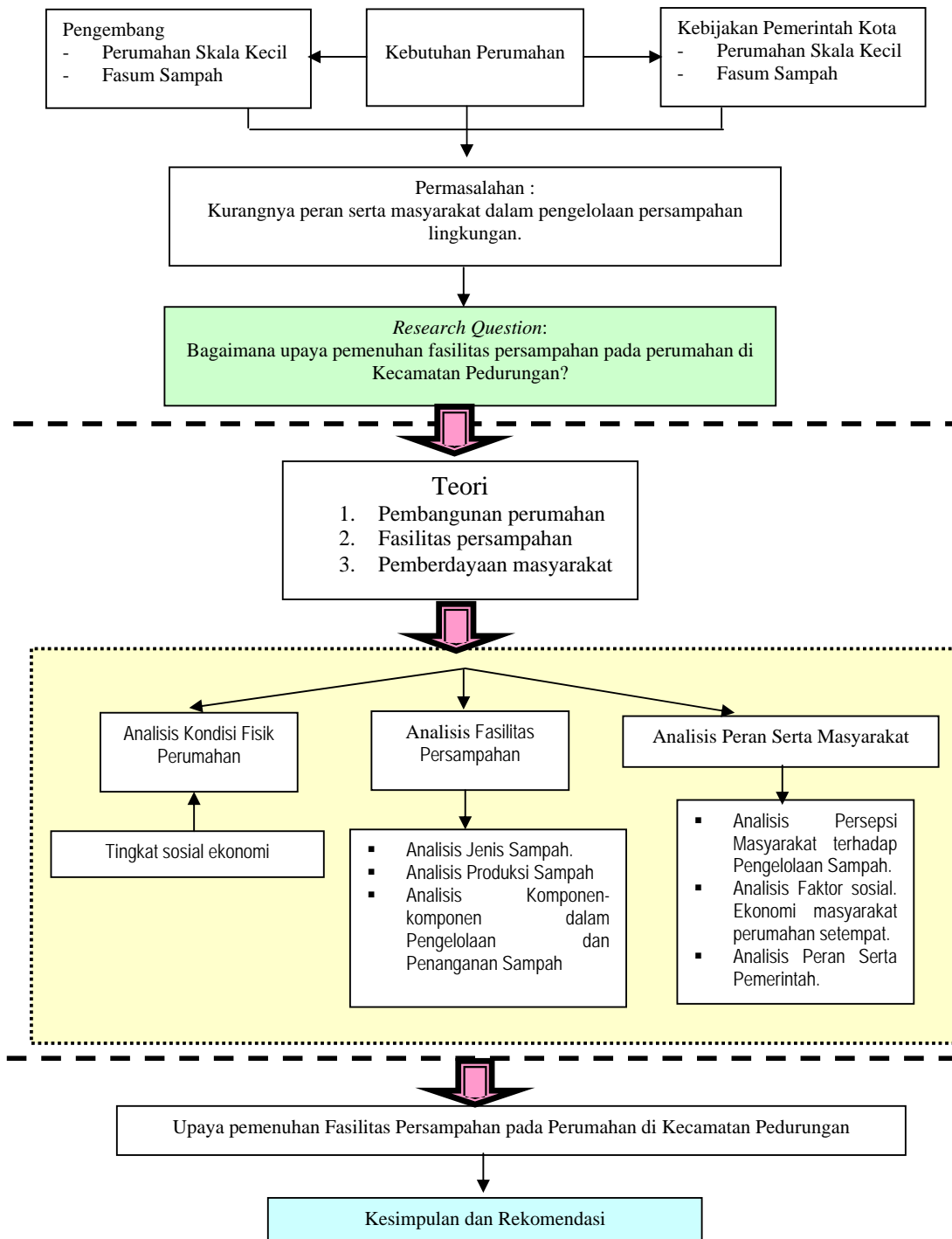
Secara garis besar kerangka pemikiran studi terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, input data, berisikan latar belakang yang diawali dengan fenomena laju

pertumbuhan dan perkembangan kota akibat peningkatan kegiatan ekonomi perkotaan serta tingginya tingkat urbanisasi, berkaitan dengan migrasi/mobilisasi yang memberikan implikasi pada kebutuhan penyediaan perumahan yang diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas kebutuhan prasarana lingkungan. Karena pada prinsipnya rumah adalah kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan umat manusia, oleh karena itu perlu mendapat perhatian khusus termasuk di dalamnya adalah penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan yang pada akhirnya akan mendukung serta menentukan tingkat kualitas suatu hunian perumahan.

Ketersediaan fasilitas umum khususnya fasilitas persampahan bagi suatu perumahan adalah sebuah keharusan, namun dewasa ini muncul fenomena baru yaitu perkembangan pembangunan kawasan perumahan yang dibangun oleh sektor informal yang cenderung mengabaikan penyediaan fasilitas sosial dan umum pada kawasan perumahan yang dibangun serta kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya pemenuhan fasilitas persampahan. Selanjutnya dari permasalahan yang ada tersebut, muncul pertanyaan penelitian/*research question*.

Bagian kedua adalah analisis kondisi fisik perumahan, analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis/tipe hunian, di perumahan dan keterkaitan lokasi perumahan dengan struktur kota; Analisis fasilitas persampahan pada perumahan di wilayah Kecamatan Pedurungan, analisis ini meliputi jenis sampah, analisis produksi sampah, dan analisis komponen-komponen dalam pengelolaan dan penanganan sampah. Sedangkan analisis peran serta masyarakat dalam upaya penyediaan fasilitas persampahan pada kawasan yang dibangun. Analisis ini meliputi; analisis persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, analisis faktor sosial, struktur dan budaya masyarakat perumahan setempat dan analisis peran serta pemerintah.

Bagian ketiga adalah *output*, yaitu produk keluaran yang diharapkan dalam studi ini adalah untuk mengetahui upaya pemenuhan fasilitas persampahan pada kawasan perumahan yang dibangun oleh sektor informal di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Setelah itu ditarik kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil studi. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran studi ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran *“Studi Upaya Pemenuhan Fasilitas Persampahan pada Kawasan Perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”*.



GAMBAR 1.3
KERANGKA PEMIKIRAN UPAYA PEMENUHAN FASILITAS PERSAMPAHAN
KAWASAN PERUMAHAN DI KECAMATAN PEDURUNGAN.

1.6 Metodologi Studi

1.6.1 Pendekatan Studi

Sebagai upaya mengembangkan penelitian agar dapat penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam mengetahui penyediaan fasilitas persampahan di perumahan yang dibangun oleh sektor informal di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Pendekatan ini gunanya untuk memberi batasan sudut pandang terhadap materi yang akan dianalisis. Sehingga perlu dilakukan beberapa pendekatan teknik analisis, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif yaitu satu metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi tentang keadaan yang sedang berlangsung pada saat itu. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab akibat melalui identifikasi dari gejala yang ada dari permasalahan. Metode ini dapat dipergunakan secara luas sehingga dapat membantu peneliti dalam melakukan identifikasi atas variabel yang ada. Pada metode penelitian ini ada dua criteria dalam suatu sistem pengelompokan untuk menjadi informasi tersebut cocok dengan yang lainnya. Dalam metode deskriptif kualitatif ini ada beberapa hal yang dapat digunakan langsung, yaitu:

- Informasi deskriptif dapat langsung difokuskan pada satu pokok teoritis, membolehkan perluasan konsep-konsep suatu perspektif teoritis yang ada pada temuan yang membuktikan kebenaran peramalan yang dibuat dalam teori.
- Informasi deskriptif dapat menggarisbawahi aspek-aspek metodologi yang penting dari kumpulan dan penafsiran data.

1.6.2 Metode Pelaksanaan Studi

1.6.2.1 Tahap Persiapan

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan data yang mendukung pelaksanaan *“Studi Upaya Pemenuhan Fasilitas Persampahan pada Kawasan Perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”*. Adapun persiapan yang dilakukan dalam memperoleh data yang valid, yaitu:

- Perumusan masalah, tujuan dan sasaran studi.
- Inventarisasi data terhadap studi yang dilakukan sebelumnya. Tahap ini digunakan untuk menyusun strategi dalam pengumpulan data maupun informasi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penelitian.
- Survey pendahuluan untuk melihat kondisi eksisting di kawasan studi yang mendukung permasalahan yang diambil.
- Studi literatur, berupa buku, makalah, seminar, jurnal, buletin dan lain-lain. Untuk mencari kajian tentang aspek perancangan kota.
- Penyusunan teknis pelaksanaan survey, meliputi pengumpulan data, observasi wilayah studi, penyebaran kuisisioner kepada responden.

1.6.2.2. Prosedur Penelitian

Kebutuhan Data

Untuk memperoleh gambaran permasalahan secara tepat serta untuk mendukung keakuratan hasil dari upaya mengetahui upaya pemenuhan fasilitas persampahan pada kawasan perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dibutuhkan adanya data yang layak (terpercaya, *up to date* dan *relevan* dengan permasalahan yang diteliti) dan mampu menunjang terlaksananya proses analisa terhadap tema yang diteliti.

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam upaya mengetahui aspek upaya pemenuhan fasilitas persampahan pada kawasan perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- RDTRK Kota Semarang 2004/2005–2014/2015,
- Data monografi desa di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang,
- Data perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Lebih rinci, data-data yang dibutuhkan untuk mendukung “*Studi Upaya Pemenuhan Fasilitas Persampahan Kawasan Perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*” tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 Instrumen Kebutuhan Data.

TABEL 1.1
INSTRUMEN KEBUTUHAN DATA

No	Data	Jenis Data & Metode	Sumber Data	Manfaat
1	Lokasi Penelitian - Luas wilayah - Kondisi Geografis - Penggunaan Lahan - Lokasi dan Luas Perumahan	Data Sekunder Literatur	Kantor Kelurahan, Bappeda, BPS	Mengetahui gambaran fisik wilayah penelitian
2	Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat - Jumlah Penduduk - Kepadatan Penduduk - Tingkat Pendidikan - Tingkat Pendapatan - Mata Pencaharian	Data primer (Kuisisioner) & Sekunder Literatur	Kantor Kelurahan, Bappeda, BPS, Kuisisioner	Mengetahui kondisi sosial, ekonomi dan budaya penghuni perumahan
3	Pengelolaan Sampah - Persepsi tentang sampah - Pola pewadahan sampah - Pola pengumpulan sampah - Jarak pelayanan ke TPS - Sarana & Prasarana persampahan - Kebijakan tentang persampahan	Data Sekunder Literatur	Kantor Kebersihan, Kecamatan Pedurungan	Mengetahui system pengelolaan persampahan
4	Aspek Upaya Pemenuhan Fasilitas Persampahan Kawasan Perumahan yang Dibangun oleh Sektor Informal di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.	Data primer (Kuisisioner)	Petugas Kebersihan Penghuni Perumahan	Mengetahui Upaya Pemenuhan Fasilitas Persampahan

Sumber: Hasil Analisis, 2005.

Teknik Pengumpulan Data

Tahapan ini merupakan tahap lanjutan dari tahapan sebelumnya, yang meliputi dua tahap yaitu tahapan pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik penyebaran wawancara terhadap instansi yang terkait (pemerintah, para ahli, planner, masyarakat). Keuntungan penggunaan teknik adalah pertanyaan yang diajukan memiliki sistematika yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti dan dengan jumlah responden yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian, serta waktu yang lebih pendek (Koentjaraningrat, 1993).

Dipilihnya teknik kuisisioner karena teknik ini tepat sebagai alat untuk memperoleh data yang luas dari kelompok orang atau anggota masyarakat yang beraneka ragam. Tujuannya untuk memperoleh informasi dengan reliabilitas serta validitas setinggi mungkin (Adi dan Prasadja, 1991). Terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitian, yaitu teknik pengumpulan data melalui kegiatan survey primer dan teknik pengumpulan data melalui survey primer dan teknik pengumpulan kegiatan survey primer dan teknik pengumpulan data melalui kegiatan survai sekunder.

1. Survey Data Primer

Kegiatan survey primer dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat primer, yaitu data-data yang secara langsung dari obyek atau lokasi penelitian. Kegiatan survey primer dalam kegiatan penelitian ini meliputi kegiatan wawancara kepada masyarakat penghuni perumahan dan petugas kebersihan di lapangan, dalam mengetahui upaya pemenuhan fasilitas persampahan kawasan perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Kegiatan wawancara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini adalah dalam kerangka mengetahui upaya pemenuhan fasilitas persampahan kawasan perumahan

di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dengan pertimbangan bahwa proses penentuan responden merupakan tahapan yang paling menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan metode analisis deskriptif kualitatif, maka pada tahap ini ditentukan criteria dasar yang akan digunakan dalam menyeleksi responden. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Petugas Kebersihan di Lingkungan Kecamatan Pedurungan.
 - o Mempunyai kewenangan dan berpengalaman dalam menangani masalah sampah di kawasan perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
2. Masyarakat Penghuni Perumahan.
 - o Tinggal pada kawasan yang dijadikan obyek penelitian.
 - o Memahami permasalahan upaya pemenuhan fasilitas persampahan kawasan perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

2. Survey Data Sekunder

Pengumpulan data tidak langsung dari sumber/obyeknya, data ini dapat diperoleh melalui buku bacaan, dokumen penelitian atau melalui kajian literatur. Sumber yang terkait bisa dari institusi pemerintah, pendidikan, maupun swasta.

Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

1. Teknik Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data merupakan suatu proses yang mencakup tahapan-tahapan pemilihan data yang tepat atau relevan dengan permasalahan yang akan diteliti serta menggolongkan atau mengklasifikasi data berdasarkan kategori tertentu sesuai

dengan kebutuhan analisis. Secara umum, langkah-langkah pengolahan data (Kartono, 1996) yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian tersebut sebagai berikut:

- *Verifikasi*

Merupakan kegiatan pemeriksaan data secara umum dengan mengacu kepada daftar kebutuhan data yang telah disusun sebelumnya. Untuk memudahkan kegiatan verifikasi data. Akan disusun table daftar periksa (*checklist*).

- *Klasifikasi*

Merupakan kegiatan penggolongan data yang diperoleh melalui kegiatan survey ke dalam kelompok data berdasarkan gejala atau kategori tertentu. Jenis kategori klasifikasi yang digunakan akan disesuaikan dengan kondisi dan upaya penggunaan data.

- *Validasi*

Dalam kegiatan ini, data-data yang telah terkumpul kemudian dinilai apakah data-data yang sudah ada cukup valid dan representatif mewakili kondisi yang diamati.

- *Tabulasi*

Proses tabulasi merupakan proses akhir dalam penyusunan data agar mudah dibaca, dimengerti dan digunakan sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Teknik Penyajian Data

Kegiatan penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pembacaan data dengan cara memvisualisasikan data sehingga data menjadi dapat dipahami secara mudah. Dalam menunjang kegiatan penelitian data akan ditampilkan dalam bentuk:

- Deskriptif, berupa penjelasan secara uraian kalimat yang bisa menjelaskan topik yang dibahas.
- Tabulasi, data yang terkumpul akan ditampilkan dalam bentuk tabel.
- Gambar, data akan ditampilkan dalam bentuk diagram, grafik serta peta.

1.6.2.3. Teknik Sampling

A. Teknik Pemilihan Sampel

Dalam menentukan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam suatu penelitian, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu biaya, tenaga, dan waktu. Dalam suatu penelitian biasanya populasi yang diteliti banyak jumlahnya, sehingga tidak mampu meneliti semuanya.

Dalam penelitian ini digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang diperoleh dari responden yang jelas terkait dan ikut dalam upaya pemenuhan fasilitas persampahan kawasan perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Responden yang di pilih adalah petugas kebersihan dan penghuni perumahan dalam obyek penelitian.

B. Jumlah Sampel

Populasi dalam penelitian adalah seluruh warga yang tinggal di lokasi perumahan yang diteliti yang berjumlah 334 KK dan 1184 Jiwa, dengan pertimbangan biaya dan waktu, tidak semua penduduk di enam (6) perumahan dijadikan sebagai responden. Sampel dalam penelitian inisebesar 100 sampel, karena menurut Arikunto, jika populasi kurang dari 100 lebih baik diambil semua ata juga sisebut sebagai bentu penelitian sampel. Jika jumlah populasi besar dapat diambil antara 10-15% dan 20-25% atau lebih.

C. Obyek Sampling

Responden dalam kegiatan penelitian ini terdiri dari: petugas kebersihan di tingkat kecamatan Semarang Timur dan Masyarakat penghuni perumahan yang jadi obyek penelitian.

1.6.2.4. Tahap Analisis Data

A. Analisis Deskriptif Kualitatif

Menurut Bogdan & Biklen (1982), analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip *interview*, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap sesuatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain. Secara substansial, pendapat ini menunjukkan bahwa di dalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data. Inilah yang menjadi ciri utama penelitian deskriptif kualitatif. (Erna Widodo & Mukhtar, 2000:23).

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif, terdapat beberapa model. Diantaranya, model penelitian yang bersifat **bibliografis/kepustakaan** (*library research*) dan model penelitian yang bersifat **lapangan** (*field research*). Penelitian kepustakaan biasanya lebih menekankan kekuatan analisis datanya pada sumber-sumber dokumentasi dan teoritis, atau hanya mengandalkan teori-teori saja, yang selanjutnya dianalisis dan interpretasikan secara luas, dalam dan tajam. Adapun analisis data deskriptif lapangan (*field research*), selain menggunakan paparan, uraian dan gambaran, dapat pula menggunakan tolok ukur sebagai pengukuran, prosentase (%) dan predikat untuk memberi makna terhadap sebuah prestasi atau level tertentu dari subyek penelitian.

B. Tahapan-Tahapan Analisis

Dalam penelitian analisis yang perlu dilakukan untuk mengkaji upaya pemenuhan fasilitas persampahan pada perumahan di Kecamatan pedurungan.

– Analisis Kondisi Fisik Perumahan.

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis hunian di perumahan dan keterkaitan lokasi perumahan dengan struktur kota.

- Analisis fasilitas persampahan pada perumahan di wilayah Kecamatan Pedurungan.
Analisis ini meliputi jenis sampah, analisis produksi sampah, dan analisis komponen-komponen dalam pengelolaan dan penanganan sampah.
- Analisis peran serta masyarakat dalam upaya penyediaan fasilitas persampahan pada kawasan yang dibangun.
Analisis ini meliputi analisis persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, analisis faktor sosial. Struktur dan budaya masyarakat perumahan setempat dan analisis kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari “*Studi Upaya Pemenuhan Fasilitas Persampahan Kawasan Perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*” ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas hal-hal yang melatarbelakangi studi, rumusan masalah, tujuan studi, ruang lingkup studi, kedudukan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi studi dan sistematika pembahasan.

BAB II FASILITAS UMUM PERSAMPAHAN DALAM KAWASAN PERUMAHAN

Bab ini terdiri dari teori-teori perancangan kota yang digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan dan analisis. Teori yang digunakan adalah **pembangunan perumahan** yang meliputi pengertian, kebijakan pembangunan perumahan, aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan rumah sederhana, aspek daya beli. Sedangkan **fasilitas persampahan**, yang meliputi penggolongan dan karakteristik sampah, pengertian pengelolaan dan penanganan sampah, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan. Teori *Community development* yang ada berupa tujuan pemberdayaan masyarakat, Langkah-langkah penanganan pemberdayaan, metoda yang digunakan dalam penanganan pemberdayaan serta *Empowerment* yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB III KAWASAN PERUMAHAN DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Bab ini berisi perkembangan Kecamatan Pedurungan terhadap Kota Semarang; pola pemenuhan fasilitas persampahan umum persampahan Kecamatan Pedurungan; Kawasan Perumahan di Kecamatan Pedurungan meliputi kondisi fisik perumahan ,fasilitas persampahan, serta peran serta masyarakat pada perumahan di Kecamatan Pedurungan, yaitu Perumahan Gria Arteri Sari, Medoho Indah, Gria Medoho Asri, Pedurungan Baru, Graha Mutiara Semarang, serta Pondok Indah.

BAB IV ANALISIS UPAYA PEMENUHAN FASILITAS PERSAMPAHAN KAWASAN PERUMAHAN YANG DIBANGUN SEKTOR INFORMAL DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Bab ini berisikan analisis kondisi fisik perumahan di Kecamatan Pedurungan; analisis fasilitas persampahan meliputi analisis jenis sampah, analisis produksi sampah, dan analisis komponen-komponen dalam pengelolaan dan penanganan sampah; serta analisis peran serta masyarakat yang meliputi analisis persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, analisis faktor sosial. struktur dan budaya masyarakat perumahan setempat dan analisis kebiasaan dalam penglolaan sampah selama ini. Selanjutnya di akhi bab ini akan disusun tentang temuan studi dari penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan tentang mengetahui upaya pemenuhan fasilitas persampahan pada kawasan perumahan yang dibangun oleh sektor informal di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan rekomendasi studi.

BAB II

FASILITAS UMUM PERSAMPAHAN PADA KAWASAN PERUMAHAN

2.1 Pembangunan Perumahan

2.1.1 Pengertian

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992). Rumah adalah bangunan yang fungsi utamanya adalah tempat tinggal sedangkan perumahan adalah sekelompok bangunan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan terbatas yang fungsi utamanya adalah tempat tinggal (SK. Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/1994).

Rumah mewah adalah rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah dengan luas kavling 54 M² sampai dengan 2.000 M² dan biaya pembangunan per meter persegi di atas harga Satuan per meter persegi tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas tipe A yang berlaku dan rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah dengan luas kapling antara 600 sampai dengan 2.000 M² dan biaya pembangunan per meter perseginya lebih kecil atau sama dengan harga satuan per meter persegi tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas tipe A yang berlaku, dengan luas lantai bangunan rumah disesuaikan dengan koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang diijinkan dalam rencana tata ruang yang berlaku (SK Menpera Nomor 04/KPTS/BKP4N/1995).

Rumah Menengah adalah Bangunan Tidak bersusun dengan luas lantai bangunan di atas 70 M² sampai dengan 150 M² dengan luas kavling 150 M² sampai dengan 200 M² (Kamus Data Perumahan dan Permukiman: 1997). Rumah Sederhana adalah Rumah tidak bersusun dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 54 M² yang dibangun dengan luas

kavling 70 M² sampai dengan 200 M² dan biaya pembangunan per M² tertinggi untuk pembangunan rumah dinas tipe C yang berlaku, yang meliputi rumah sederhana tipe besar, rumah sederhana dan kavling siap bangun (Kamus Data Perumahan dan Permukiman: 1997).

Rumah Sangat Sederhana adalah Rumah tidak bersusun yang pada tahap awalnya menggunakan bahan bangunan berkualitas sangat sederhana dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial (Kamus Data Perumahan dan Permukiman:2001). Rumah Sangat sederhana adalah rumah tidak bersusun dengan luas lantai bangunan 21 M² sampai dengan 36 M² dan sekurang-kurangnya memiliki WC dan ruang serba guna dengan biaya pembangunan per meter persegi sekitar setengah dari biaya pembangunan per meter persegi untuk rumah sederhana (SK Menpera:1995).

Hyward dalam Eko Budihardjo, mengemukakan konsepnya mengenai rumah yaitu (Budihardjo, 1990):

- a. Rumah sebagai pengejawantahan diri, maksudnya adalah rumah sebagai simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya. Dengan demikian dalam menentukan rumah dan lingkungan tempat tinggal setiap manusia mempunyai persepsi yang berbeda-beda.
- b. Rumah sebagai wadah keakraban, pada konsep ini di dalam rumah akan tercipta rasa memiliki, kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman, sehingga menjadikan penghuni betah untuk menempati rumah tersebut.
- c. Rumah sebagai tempat menyendiri dan menyepi, yaitu rumah merupakan tempat kita melepaskan diri dari dunia luar, dari tekanan dan ketegangan, dari kegiatan rutin. Oleh karena itu dibutuhkan suatu lingkungan hunian yang tenteram, nyaman dan damai sebagai elemen pendukung konsep ini.

- d. Rumah sebagai akar dan kesinambungan, dalam konsep ini rumah atau kampung halaman dilihat sebagai tempat untuk kembali pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan dalam untaian proses ke masa depan.
- e. Rumah sebagai wadah kegiatan utama sehari-hari, untuk menciptakannya memerlukan adanya kelengkapan sarana prasarana lingkungan sebagai elemen pendukung lingkungan perumahan.
- f. Rumah sebagai pusat jaringan sosial, yaitu rumah memberikan peluang untuk berinteraksi dan beraktivitas komunikasi yang akrab dengan lingkungan sekitar seperti teman, tetangga dan keluarga.

UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman berbunyi Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan, maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.

Pembangunan perumahan dan permukiman dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sektor lain (berbagai macam industri bahan bangunan), memberikan kesempatan berusaha (konsultan, kontraktor, pengembang dan lain-lain), menciptakan lapangan kerja dan dapat mendukung pertumbuhan wilayah. (Kantor Menpera RI,1997)

Perumahan yang layak dalam permukiman yang sehat dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan martabat, mutu kehidupan dan penghidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil makmur (Purbokusumo,1992):

1. Kepada calon konsumen yang ingin membeli rumah diberikan subsidi bunga untuk dapat diperolehnya dari bank.
2. Kepada produsen diberikan kemudahan dan subsidi dalam bentuk penyediaan kredit modal kerja untuk pembebasan lahan, 50% untuk membangun RS dan 75% untuk membangun RSS dan subsidi dalam bentuk sumbangan (*grand*) PS-DPU (Prasarana Dasar ke PU-an) yaitu dalam bentuk jaringan jalan dan saluran drainage.

Rumah layak tidak lepas dari standar minimal kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan kualitas teknis yang berdasarkan kondisi setempat. Layak harus dapat memberikan kepastian lokasi/penempatan dan hak penghunian serta kepemilikan rumah (Kantor Menpera RI, 1992)

Pembangunan perumahan dan permukiman di kota adalah suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bersifat kesejahteraan dan memiliki dampak ekonomi yang positif. Karena pembangunan perumahan kota memiliki “*multiplier effect*”:

1. Dekat dengan tempat kerja/lokasi yang memungkinkan mencari/melakukan pekerjaan informal adalah esensial artinya tidak dapat ditawar lagi.
2. Kualitas fisik hunian dan lingkungan tidak penting sejauh mereka mungkin menyelenggarakan kehidupan dan penghidupan mereka.
3. Hak-hak penguasaan atas tanah dan bangunan khususnya hak milik tidak penting, yang penting mereka tidak diusir atau digusur dari lokasi tersebut

Pembangunan perumahan merupakan bagian dari pembangunan perkotaan. Pembangunan perumahan selain sebagai pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, pembangunan perumahan juga bertujuan untuk memberikan arah bagi pertumbuhan kota maupun wilayah, oleh karena itu pembangunan perumahan diarahkan sehingga terkait dengan pembangunan perkotaan. Keterkaitan pembangunan perumahan dan pembangunan

perkotaan dapat dilihat dari segi keterkaitan proses pembangunan dan keterkaitan fungsional. (Yodohusodo, 1991). Di suatu sisi kota juga diartikan sebagai pusat permukiman penduduk maupun pertumbuhan dalam sistem pengembangan kehidupan sosio kultural yang luas. Dengan demikian di kota terdapat kumpulan perumahan dengan berbagai fasilitas lingkungan di dalamnya dan penduduk yang heterogen kedudukan sosialnya (Ilhami,1990).

Turner mengemukakan bahwa pada dasarnya ada tiga prinsip pembangunan perumahan, yaitu:

- a. Yang terpenting dari rumah bukan merupakan apa adanya, melainkan dari akibat yang ditimbulkan terhadap penghuni rumah tersebut.
- b. Rumah tidak lagi dipandang sebagai produk selesai/akhir, melainkan proses yang berkembang.
- c. Kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam rumah akan lebih ditolerir bila hal itu menjadi tanggungjawab penghuni daripada bila merupakan tanggungjawab orang lain.

Lebih jauh pokok-pokok pikiran Turner tentang keberhasilan pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu, ditentukan oleh kepuasan yang didapat penghuninya dari perumahan itu yang bergantung dari:

- a. Nilai rumah (*the value of housing*), yaitu sejauhmana perumahan itu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, terutama dalam hal kemudahan pencapaian (aksesibilitas) baik sosial maupun ekonomi, jaminan keamanan terhadap kepemilikan dan bakuan fisik rumah dan lingkungan.
- b. Ekonomi perumahan (*housing of economy*), yaitu efisiensi penggunaan-sumberdaya yang tersedia, maksudnya sejauhmana perumahan tersebut tidak melampaui batas beban yang harus dipikul oleh penghuninya.

- c. Kewenangan terhadap perumahan (*authority over housing*), yaitu sejauh mana sumberdaya untuk perumahan dapat diraih oleh kewenangan penghuninya.

Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman dalam PJP II meliputi:

- a. Pembangunan perumahan dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat luas guna peningkatan pemerataan dan memperluas cakupan pelayanan penyediaan perumahan dan permukiman dan dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
- c. Pengembangan peranan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perumahan dan permukiman untuk mendorong terciptanya penyediaan perumahan dan permukiman secara mandiri sehingga mengurangi ketergantungan pembiayaan kepada pemerintah.
- d. Pengembangan sistem pendanaan perumahan dan permukiman sehingga mampu menciptakan iklim yang menarik bagi pembangunan perumahan oleh masyarakat dan dunia usaha.
- e. Pemantapan kelembagaan dan pola pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman secara terpadu.
- f. Pengembangan peraturan perangkat pendukung.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pekerjaan Umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah Tingkat I dan Tingkat II menyebutkan bahwa sebagian urusan dibidang pekerjaan umum yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah termasuk sebagian bidang cipta karya, yang meliputi pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan yang meliputi pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta

prasarana dan fasilitas lingkungan serta pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungannya.

Sistem pembangunan perumahan, dikemukakan pula oleh Turner terdapat dua sistem yaitu:

- a. Sistem Pembangunan Formal yaitu suatu sistem pembangunan perumahan yang perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunannya dilakukan oleh pihak lain atau lembaga formal, seperti pemerintah atau swasta yang biasanya perumahan tersebut dibangun dalam bentuk jadi dan menggunakan standar-standar ideal.
- b. Sistem pembangunan non formal yaitu suatu sistem pembangunan yang perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunannya dilakukan terutama oleh penghuni sendiri atau lembaga non formal, biasanya dibangun tanpa mengikuti standar yang ideal.

2.1.2 Kebijakan Pembangunan Perumahan

Kebijakan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini lebih dikenal dengan pola 1:3:6, artinya pembangunan perumahan oleh pihak pengembang harus dapat memberikan jumlah keseimbangan yaitu pembangunan 1 (satu) buah rumah mewah harus dapat diikuti dengan pembangunan 3 (tiga) buah rumah menengah dan 6 (enam) buah rumah sederhana yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun yang dimaksud dengan kelompok sasaran pembangunan rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana tersebut adalah:

- a. Pembangunan rumah mewah diarahkan bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Bagi masyarakat golongan ini pengadaan rumah bukan merupakan suatu masalah karena mereka dapat membeli rumah yang diinginkan sesuai dengan keinginan/selera

mereka sehingga harga rumah yang ditawarkan diserahkan sepenuhnya terhadap kehendak pasar.

- b. Pembangunan rumah menengah atau rumah sedang, ditujukan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan menengah akan tetapi masih belum cukup mampu untuk mengadakan rumah sehingga dalam pengadaan rumah masih memerlukan rangsangan/subsidi dari pemerintah baik dalam bentuk fasilitas maupun kepemilikannya.
- c. Pembangunan rumah sederhana yang diarahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok ini yang memiliki keberdayaan yang sangat lemah dalam pengadaan rumah karena rendahnya tingkat penghasilan mereka sehingga dalam pengadaan rumah sangat membutuhkan peran pemerintah yang lebih besar.

Secara khusus program penyediaan perumahan dan permukiman:

- a. Pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS).
- b. Rumah Susun (Rusun), secara fungsional Rumah Susun terdiri dari rusun hunian, untuk tempat tinggal, rusun non hunian, sebagai tempat usaha atau sosial dan rusun campuran, sebagai tempat tinggal dan usaha.
- c. Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba dan Lisiba).
- d. Pengembangan Lahan Terarah (*Guided Land Development*)

Sementara itu kebijakan fisik rumah didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/PRT/1991 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Rumah Sangat Sederhana, menyebutkan bahwa standar teknik minimum Rumah Sangat Sederhana.

- a. Tersedia listrik dan air bersih minimal sumur;
- b. Lantai rumah diberi perkerasan untuk memudahkan pembersihan dan mengurangi kelembaban, khusus lantai kamar mandi dari plesteran semen pasir.

- c. Bahan penutup dinding dari anyaman yang dilabur atau dikamprot dengan kapur tembok;
- d. Dinding kamar mandi dibuat dari pasangan tembok dan dinding kapur dilapis bahan tahan api atau dari pasangan tembok minimal sampai ketinggian 150 cm dari muka lantai;
- e. Rangka atap terdiri dari kuda-kuda dan gorden dari kayu kaso dan reng bambu;
- f. Penutup atap dari asbes semen gelombang, seng gelombang atau genteng sederhana.
- g. Tidak perlu dipasang tutup langit-langit;
- h. Prasarana lingkungan minimal berupa jalan tanah yang diperkeras dengan skala jenis batuan, minimal dari kerikil dengan lebar penampang daerah manfaat jalan (Damaja) 6 meter dan mempunyai lebar perkerasan jalan sekurang-kurangnya 3 meter;
- i. Kelompok rumah sangat sederhana dapat dibangun tersendiri atau sebagai bagian dari kawasan perumahan yang lengkap dengan syarat warga penghuni Rumah Sangat Sederhana dapat memanfaatkan fasilitas lingkungan yang tersedia disekitarnya.

2.1.3 Aspek-aspek Yang Berkaitan Dengan Pembangunan Rumah Sangat Sederhana

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan perumahan dan permukiman yang dikemukakan oleh Siswono Yudoyono dalam Sunaryo Mulyo (2000) adalah; kependudukan, pertanahan, keterjangkauan masyarakat, kelembagaan, perkembangan teknologi dan jasa konstruksi, peraturan/perundangan, serta peran serta masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kependudukan

Peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat akan sangat mempengaruhi terhadap pembangunan perumahan dan permukiman, utamanya terhadap penyediaan perumahan dan penyediaan sarana-prasarananya. Ini akan menjadi masalah apabila tidak ada

keseimbangan antara kemampuan masyarakat, ketersediaan lahan perumahan serta rendahnya kemampuan pemerintah baik dari segi pendanaan, pengaturan maupun pengendalian.

b. Pertanahan

Faktor pertanahan dalam pembangunan perumahan dan permukiman menjadi sangat penting karena dalam pembangunan fisik rumah maupun sarana dan prasarananya pasti membutuhkan lahan. Akan tetapi permasalahan karena dengan bertambahnya penduduk perkotaan membutuhkan lahan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk tetapi di sisi lain lahan di perkotaan sangat terbatas sehingga menimbulkan berbagai konflik kepentingan sehingga akar bawah yang menjadi korbannya. Hal ini mengakibatkan timbul adanya perumahan liar maupun kawasan kumuh.

c. Keterjangkauan masyarakat

Kemampuan dan daya beli masyarakat merupakan faktor yang sangat dominan. Hal ini dikaitkan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman lebih mengandalkan pada partisipasi dan peran aktif masyarakat, kenyataan sekarang ini menunjukkan bahwa hanya 15% saja kebutuhan perumahan disediakan melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) lewat Bank BTN maupun bank pemerintah dan swasta lainnya. Sisanya 85% disediakan sendiri oleh masyarakat. Keterjangkauan daya beli ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat dan kenaikan harga rumah itu sendiri.

d. Kelembagaan

Kelembagaan ini meliputi perangkat yang berfungsi membuat dan memegang kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan baik sektor pemerintah maupun swasta yang berada di pusat maupun di daerah.

e. Perkembangan Teknologi dan Jasa Konstruksi

Pembangunan perumahan di Indonesia sebagian besar masih bergerak di segmen yang tradisional dan transisional, serta menggunakan teknologi sederhana. Sebagian besar masih dilakukan oleh masyarakat secara perorangan dan belum secara kelompok atau masal serta belum terpadu, sehingga secara ekonomi merupakan pemborosan baik dari segi bahan, tenaga maupun prasarana yang harus disediakan. Bahan bangunan misalnya; pasir, batu kali, batu merah, menjadikan harga rumah menjadi sangat mahal. Jasa konstruksi masih mendominasi prosyek-proyek pemerintah dan belum mampu merambah bidang perumahan. Dunia real estat masih menjadi golongan menengah ke atas.

f. Peraturan/ Perundang-undangan

Untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan pembangunan perumahan diperlukan aturan, pedoman dan berbagai kebijakan sebagai landasan atau pegangan bagi lembaga atau instansi baik di pusat maupun di daerah. Peraturan dan pedoman ini harus selalu diperbaharui sehingga mampu menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan.

g. Peran Serta Masyarakat

Dengan bergesernya fungsi pemerintah yang dulunya sebagai *provider* menjadi *enabler*, maka dalam pembangun perumahan peranan pemerintah lebih bersifat fasilitator, pembina dan mengatur, disamping itu Kredit Pemeilikan Rumah (KPR) sangat terbatas, sehingga peran serta masyarakat sangat menentukan sekali keberhasilan pembangunan perumahan dan permukiman. Pemberdayaan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan adalah merupakan tugas pemerintah untuk saat ini dan masa yang akan datang.

2.1.4 Aspek Daya Beli

Aspek daya beli merupakan kemampuan dan kemampuan rumah tangga untuk mengeluarkan sebagian pendapatan untuk perumahan. Aspek daya beli harga rumah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, distribusi pendapatan, harga rumah yang ditawarkan dan harga barang kebutuhan lainnya. Untuk beberapa kelompok masyarakat dipengaruhi pula oleh faktor-faktor yang bersifat non ekonomi, seperti faktor lokasi rumah, tipe rumah, ketersediaan fasilitas dan sebagainya. Kenyataan menunjukkan masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu membeli rumah dengan fasilitas KPR sederhana baik yang dibangun oleh Perum Perumnas maupun pengembang, namun di sisi lain menunjukkan adanya potensi, bahwa masyarakat biasanya mampu memperbesar dan meningkatkan rumahnya secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.

Untuk mendekati keterjangkauan masyarakat dengan melihat pula potensi yang ada pada masyarakat, maka perlu upaya membangun Rumah sangat sederhana dengan menggunakan bahan bangunan yang lebih sederhana dari yang biasa dipakai tetapi cukup tahan lama dan memenuhi kelayakan teknis maupun kesehatan. Selain itu bisa dilakukan pula penundaan pemasangan beberapa bagian bangunan yang kurang perlu, yang kemungkinan bisa dikembangkan sendiri oleh pemiliknya. Prasarana lingkungan juga dilakukan penyederhanaan, sehingga seluruh pembiayaan pembangunan maupun kawasan permukiman tersebut bisa ditekan, yang berarti harga rumah akan lebih murah dan diharapkan dapat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Parwoto (1999), menyatakan meskipun kebutuhan perumahan pada dasarnya merupakan tanggungjawab individu, tetapi pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi tanggungjawab bersama masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab pemerintah menduduki posisi pengemudi (*reinventing government*) maka meskipun tujuan telah ditetapkan

bersama, tetapi tercapai atau tidaknya tujuan tersebut (berlabuh atau kandas) tidak pelak lagi adalah tanggungjawab pengemudi (pemerintah). Parwoto (1999) Sasaran utama penyediaan masy RS/RSS yaitu para Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II, buruh, pedagang kaki lima, sopir angkutan umum dan masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin lainnya. Parwoto (1999) Dalam kenyataannya, pada umumnya masyarakat berpenghasilan rendah melihat perumahan sebagai kebutuhan dasar dan sumberdaya kapital mereka yang dapat diaktualisasikan untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan mereka. Oleh sebab itu bagi masyarakat penghasilan rendah ciri perumahan yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka adalah sebagai berikut ;

Lebih jauh Purbokusumo (1992) mengatakan bahwa perumahan dan permukiman mempunyai arti dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat Indonesia, perumahan merupakan pencerminan dan pengejawantahan dari diri pribadi manusia, baik secara perseorangan maupun secara kesatuan dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Ada ungkapan di masyarakat kita yang berbunyi "*rumahmu, wajahmu dan jiwamu*". Dari ungkapan itu tampak bahwa perumahan dalam kehidupan manusia Indonesia mempunyai art dan makna yang sangat dalam. Purbokusumo (1992). Dalam kehidupan masyarakat manusia merupakan insan sosial, insan ekonomi dan insan politik. Sebagai insan sosial, manusia memandang rumah dalam lingkup pemenuhan kebutuhan kehidupan sosial budaya dalam masyarakat. Sebagai insan ekonomi yang memandang fungsi ekonomi, rumah merupakan investasi jangka panjang, yang akan memperkokoh kehidupan dimasa depan.dan sebagai insan politik manusia memandang rumah dalam lingkup peningkatan martabat, mutu kehidupandan penghidupan serta kesejahteraan masyarakat dalam masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan.

Lilia GC Cassanova (1992) mengatakan bahwa masalah keterjangkauan mengarah pada ketidak mampuan penghuni rumah atau keluarga untuk memiliki atau menyewa sebuah rumah dikarenakan pendapatan rendah. Prawoto (1992), Agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat menjangkau harga komoditi yang dipasarkan tersebut (permintaan dan pasokan bertemu).

2.2 Fasilitas Persampahan

Menurut Sujarto (1989:170), fasilitas dapat diartikan sebagai suatu aktivitas ataupun materi yang berfungsi melayani kebutuhan individu di dalam suatu lingkungan kehidupan. Secara sistematis aktivitas maupun materi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu fasilitas sosial dan fasilitas umum. Fasilitas sosial dapat diartikan sebagai aktivitas ataupun materi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat dapat memberikan kepuasan sosial, mental, spiritual diantaranya adalah fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan, kemasyarakatan, rekreasi, olahraga serta pemakaman umum. Sementara fasilitas fisik atau fasilitas umum adalah aktifitas atau materi yang dapat melayani masyarakat akan kebutuhan fisik, berupa utilitas umum yaitu air bersih, sanitasi lingkungan, drainase, persampahan, gas, listrik, telepon dan jaringan jalan.

2.2.1 Penggolongan dan Karakteristik Sampah

Penggolongan ini berdasarkan atas beberapa kriteria, yaitu berdasarkan asal, komposisi, bentuk, lokasi, proses terjadinya, sifat, dan jenisnya. Penggolongan sampah ini sangat penting karena berkaitan erat dengan penanganan dan pemanfaatan sampah. Berikut ini merupakan pengolongan-penggolongan sampah berdasarkan atas asal, komposisi, bentuk, lokasi, proses terjadinya, sifat, dan jenisnya yaitu:

a. Penggolongan sampah berdasarkan asalnya

Sampah dapat dijumpai di segala tempat dan hampir di semua kegiatan.

Berdasarkan asalnya, sampah dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Sampah dari hasil kegiatan Rumah Tangga
- 2) Sampah dari hasil kegiatan industri,
- 3) Sampah dari hasil kegiatan pertanian (perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan)/limbah hasil-hasil pertanian,
- 4) Sampah dari hasil kegiatan perdagangan,
- 5) Sampah dari hasil kegiatan pembangunan,
- 6) Sampah jalan raya.

b. Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya

Dalam suatu kegiatan mungkin akan menghasilkan jenis sampah yang sama, sehingga komponen-komponen penyusunnya juga sama. Misalnya sampah yang hanya terdiri dari kertas, logam, atau dedaun saja. Berdasarkan komposisinya, sampah dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Sampah yang seragam

Sampah yang termasuk dalam kategori ini misalnya sampah dari kegiatan industri dan sampah dari kegiatan kantor (kertas, karton, kertas karbon).

- 2) Sampah yang tidak seragam (campuran)

Sampah yang termasuk dalam kategori ini misalnya sampah yang berasal dari pasar atau sampah dari tempat-tempat umum.

c. Penggolongan sampah berdasarkan bentuknya

Berdasarkan bentuknya sampah digolongkan menjadi tiga macam:

- 1) Sampah berbentuk padatan (*solid*), misalnya daun, kertas, karton, kaleng, plastik.

- 2) Sampah berbentuk cairan (termasuk bubur), misalnya bekas air pencuci, bahan cairan yang tumpah, limbah industri yang berbentuk cairan (blotong/tetes dari pabrik gula tebu).
- 3) Sampah berbentuk gas, misalnya karbondioksida, ammonia, dan gas-gas lainnya.

d. Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya

Berdasarkan lokasi terdapatnya sampah, maka sampah dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Sampah kota (urban), yaitu sampah yang terkumpul di kota-kota besar.
- 2) Sampah daerah, yaitu sampah yang terkumpul di daerah-daerah di luar perkotaan, misalnya di desa, di daerah permukiman, di pantai.

e. Penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya

Berdasarkan proses terjadinya, sampah dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Sampah alami, ialah sampah yang terjadi karena proses alami, misalnya rontoknya daun-daunan di pekarangan rumah.
- 2) Sampah non-alami, ialah sampah yang terjadi karena kegiatan manusia.

f. Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, sampah digolongkan menjadi:

- 1) Sampah organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik, dan oleh karenanya tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Bahan-bahan ini mudah didegradasi oleh mikrobia. Contoh dari sampah jenis ini antara lain terdiri dari dedaunan, kayu, kertas, karton, tulang, sisa-sisa makanan ternak, sayur, buah.
- 2) Sampah anorganik, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak tersusun oleh senyawa-senyawa organik, sehingga tidak dapat didegradasi oleh mikrobia. Contohnya yaitu kaleng, plastik, logam, gelas, mika.

g. Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya

Berdasarkan jenisnya, sampah dapat digolongkan menjadi sembilan macam, sebagai berikut:

- 1) Sampah makanan (sisa-sisa makanan termasuk makanan ternak).
- 2) Sampah kebun/ pekarangan,
- 3) Sampah kertas,
- 4) Sampah plastik, karet, dan kulit,
- 5) Sampah kain,
- 6) Sampah kayu,
- 7) Sampah logam,
- 8) Sampah gelas dan keramin,
- 9) Sampah berupa abu dan debu.

h. Penggolongan Besaran Timbulan Sampah

Berdasarkan SK.SNI Nomor T-13-1990-F penentuan Besaran Timbulan sampah dapat diuraikan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

1) Klasifikasi kota

TABEL II.1
BESARAN TIMBULAN SAMPAH BERDASARKAN KLASIFIKASI KOTA

NO.	SATUAN KLASIFIKASI KOTA	VOLUME (L/ORANG/HARI)	BERAT (KG/ORANG/HARI)
1	Kota Sedang	2,75 – 3,25	0,70 – 0,80
2	Kota Kecil	2,5 – 2,75	0,625 – 0,70

Sumber: SK.SNI Nomor T-13-1990-F

2) Komponen-komponen sumber sampah

TABEL II.2
BESARAN TIMBULAN SAMPAH
BERDASARKAN KOMPONEN-KOMPONEN SUMBER SAMPAH

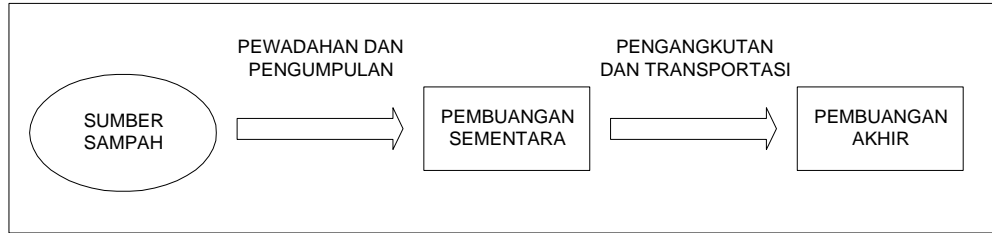
NO.	KOMPONEN SUMBER SAMPAH	SATUAN	VOLUME (LITER)	BERAT (KG)
1.	Rumah permanen	Per orang/hari	2,25 – 2,50	0,350 – 0,400
2.	Rumah s. permanen	Per orang/hari	2,00 – 2,25	0,300 – 0,350
3.	Rumah n.permanen	Per orang/hari	1,75 – 2,00	0,250 – 0,300
4.	Kantor	Per pegawai/hari	0,50 – 0,75	0,025 – 0,100
5.	Toko/ruko	Per petugas/hari	2,50 – 3,00	0,150 – 0,350
6.	Sekolah	Per murid/hari	0,10 – 0,15	0,010 – 0,020
7.	Jalan arteri sek.	Per meter/hari	0,10 – 0,15	0,020 – 0,100
8.	Jalan kolektor sek	Per meter/hari	0,10 – 0,15	0,010 – 0,050
9.	Jalan lokal	Per meter/hari	0,05 – 0,1	0,005 – 0,025
10.	Pasar	Per meter ² /hari	0,20 – 0,60	0,1 – 0,3

Sumber: SK.SNI Nomor T-13-1990-F

2.2.2 Pengertian Pengelolaan dan Penanganan Sampah

Prinsip pengelolaan persampahan adalah membersihkan kota dari sampah serta mengamankan sampah agar tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah ialah usaha untuk mengatur atau mengelola sampah dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan, pengangkutan, sampai pengolahan dan pembuangan akhir.

Penanganan sampah ialah perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan lingkungan, yang dapat berbentuk membuang sampah saja atau mengembalikan (*recycling*) sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Sehingga dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan dan penanganan sampah ialah usaha untuk mengelola sampah dengan tujuan untuk menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih, sehat, dan teratur. Perencanaan dalam pengelolaan sampah disuatu daerah tertentu tidak dapat dirancang oleh dinas yang berwenang saja tanpa melibatkan instansi-instansi yang lain. Instansi-instansi yang perlu dilibatkan dalam penyusunan rencana secara umum yaitu dinas kebersihan.



(Sumber: Cipta Karya, 1999)

GAMBAR 2.1
POLA MANAJEMEN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Perencanaan pengelolaan sampah merupakan suatu proses untuk mengembangkan rencana-rencana dan program-program yang sesuai dengan factor-faktor pengelolaan sampah disuatu daerah, hal ini tergantung dari kemampuan anggaran, ketersediaan fasilitas, tenaga dan sebagainya. Dalam pembahasan tentang perencanaan pengelolaan sampah, terdapat beberapa istilah, antara lain (Sarudji, 1983):

1. Elemen Fungsional,
2. Sistem
3. Program
4. Alternatif

2.2.3 Komponen-komponen dalam Pengelolaan dan Penanganan Sampah

Sistem pengelolaan dan penanganan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, dimana antara satu dengan yang lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Komponen-komponen itu antara lain:

2) Organisasi dan Manajemen

Aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek

ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik wilayah kota, serta memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat. Perancangan dan pemilihannya disesuaikan dengan:

- Peraturan pemerintah yang membinanya,
- Pola operasional yang diterapkan,
- Kapasitas kerja sistem,
- Lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani.

3) *Teknik Operasional*

Tahap-tahap tersebut antara lain:

a. *Sistem pengumpulan*

Sistem ini memiliki beberapa pola antara lain:

- Pola individual, yaitu pengumpulan sampah dari rumah ke rumah dengan alat angkut jarak pendek atau truk dengan layanan *door to door* untuk diangkut ke tempat penampungan sementara.
- Pola Komunal, yaitu pengumpulan sampah dari beberapa rumah dilakukan pada satu titik pengumpulan langsung oleh penghasil sampah, untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan.

b. *Sistem pemisahan*

Sistem ini bertujuan untuk memisahkan jenis-jenis sampah, yaitu sampah organik dipisahkan dari sampah non organik (gelas, logam, plastik, keramik), kemudian sampah-sampah tersebut dipisahkan lagi berdasarkan jenisnya menurut keperluan, agar mempermudah dalam pengolahan dan pembuangannya.

c. *Sistem pemindahan*

Sistem ini menerima sampah yang berasal dari sumber, untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir yang memiliki pola-pola sebagai berikut, yaitu:

- Pola sistem permanent.
- Pola sistem yang dapat diangkat dan dipindahkan.

Sistem ini memiliki sasaran yaitu:

- sebagai peredam tingkat ketergantungan fase pengumpulan dengan fase pengangkutan.
- sebagai pos pengendalian tingkat kebersihan wilayah yang bersangkutan.

d. Sistem pengangkutan

Sistem pengangkutan memiliki 3 jenis, yaitu:

- Pengangkutan dari satu lokasi pemindahan ke tempat pembuangan akhir,
- Pengangkutan dari kelompok pemindahan menuju ke tempat pembuangan akhir,
- Pengangkutan dengan pola *door to door*.

e. Sistem pengolahan dan sistem pembuangan

Sistem pengolahan dan pembuangan sampah yang telah dikenal antara lain:

▪ Penimbunan sampah

Penimbunan sampah ialah usaha menempatkan sampah pada suatu tempat yang rendah, kemudian menimbunnya dengan tanah. Sedangkan beberapa keuntungan apabila sampah ditimbun ialah:

1. Tanah yang semula tidak rata, dapat dibuat rata,
2. Tempat yang semula tidak dapat digunakan, menjadi berfungsi sebagai tempat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya gedung, jalan, dan sebagainya,
3. Sebagai tanah pertanian, akan menjadi tanah yang sangat subur.

Untuk mempercepat proses degradasi sampah diperlukan penutupan dengan tanah. Perbandingan antara banyaknya sampah dan tanah penutup terlebih dahulu harus ditentukan agar dapat diketahui areal yang diperlukan. Pada umumnya perbandingan yang

dipergunakan adalah 4 bagian sampah dengan densitas 100 lb/ft³ dengan satu bagian tanah. Kebutuhan areal untuk menimbun sampah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$V = 365 \left(\frac{W \times P}{D} \right) (1+R)$$

dimana:

- V = volume tanah yang diperlukan
- W = jumlah sampah, dinyatakan dalam kg/kapita/hari
- P = Jumlah penduduk yang diperkirakan menghasilkan sampah
- R = Perbandingan tanah penimbunan dan sampah
- D = densitas sampah, kg/m³ atau unit satuan lainnya
- 365 = jumlah hari dalam satu tahun

Upaya tersebut tidak begitu menimbulkan pekerjaan yang sulit, misalnya penimbunan sampah rumah tangga yang hanya sedikit. Tapi bila jumlah sampah sangat banyak seperti yang terkumpul di kota-kota besar, maka pekerjaan ini membutuhkan perhatian ekstra yang memerlukan perencanaan, peralatan, dan pelaksanaan yang cermat.

- Penimbunan tanah sehat (*Sanitary Landfill*)

Penimbunan tanah sehat yang paling tepat menggunakan sampah jenis rubbish dan *garbage*, karena kemungkinan didatangi oleh binatang-binatang kotor dan bau tak sedap hampir tidak ada. Caranya, sampah dibuang dan dibiarkan menumpuk/menggunung. Setelah mencapai ketinggian yang diinginkan, permukaan atasnya ditimbun tanah setebal kurang lebih 60 cm. Cara ini membutuhkan biaya yang cukup besar, namun manfaatnya yaitu sampah yang telah ditimbun tersebut tidak merugikan dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungannya.

- Pembakaran sampah (*Incineration*)

Pembakaran sampah dapat dikerjakan pada suatu tempat, misalnya pada tanah lapang yang jauh dari segala kegiatan agar tidak mengganggu. Namun pembakaran seperti ini sulit dikendalikan, karena apabila tertiuap angin kencang maka sampah, arang sampah,

asap, debu, dan abu dapat terbawa ke tempat-tempat sekitarnya, sehingga dapat menimbulkan gangguan. Pembakaran yang paling baik dikerjakan pada suatu instalasi pembakaran, karena dapat diatur prosesnya sehingga tidak mengganggu lingkungan. Tetapi pembakaran dengan cara ini membutuhkan biaya operasi yang mahal.

- Penghancuran (*Pulverisation*)

Sampah dari bak penampung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang lebih ringkas oleh mobil pengumpul sampah yang dilengkapi dengan alat pelumat sampah. Potongan-potongan sampah yang telah dihancurkan tersebut dapat digunakan untuk menimbun tanah rendah dan dapat juga dibuang ke laut tanpa menimbulkan pencemaran.

- Pemanfaatan ulang (*Recycling*)

Sampah-sampah yang masih bisa diolah kembali dipungut dan dikumpulkan; misalnya kertas, pecahan kaca, botol bekas, logam-logam, dan potongan plastik. Kemudian sampah yang telah dikumpulkan tersebut diolah lagi menjadi karton, kardus pembungkus, alat-alat dan perangkat rumah tangga dari plastik dan kaca. Namun kertas yang telah menjadi sampah tidak boleh digunakan begitu saja untuk membungkus makanan, karena dapat membahayakan kesehatan.

- Pembuatan Kompos (*Composting*)

Langkah-langkah untuk mengolah sampah organik dalam bentuk kompos telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang produksi pupuk kompos, untuk kemudian dijual ke pasaran. Ada beberapa langkah pengomposan secara fabrikasi, antara lain sebagai berikut:

1. Sampah tak lapuk dan tak mudah lapuk (kaca, mika, plastik, logam, semen beton) disisihkan dan dibuang, sehingga hanya tinggal sampah yang mudah lapuk saja.

2. Sampah dihancurkan menggunakan mesin khusus sampai lumat, agar proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme pembusuk dapat berlangsung dengan baik.
3. Sampah ditimbun secara teratur dalam suatu hamparan tertutup yang bisa diawasi suhu, tingkat kelembaban, dan aliran udaranya dengan menggunakan alat khusus agar proses *decomposition* berlangsung optimal.
4. Setelah kompos jadi, maka kompos dikeringkan dan digiling. Kemudian dikemas dan siap untuk dipasarkan.

Sedangkan untuk pengolahan secara sederhana, sampah yang telah digiling, dihamparkan tertimpa sinar matahari selama beberapa hari sampai membusuk dengan sempurna. Kompos yang dalam pembuatannya dilapisi dengan lumpur dasar sungai lebih baik dibandingkan dengan tidak dilapisi lumpur. Proses pembuatan kompos membutuhkan waktu sekitar 2 hari sampai 6 minggu, tergantung cara penanganannya.

4) *Pembiayaan*

Aspek pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar roda sistem pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Diharapkan bahwa sistem pengelolaan persampahan di Indonesia akan menuju pada pembiayaan sendiri, termasuk di sini pembentukan perusahaan daerah atau swasta. Sektor pembiayaan ini menyangkut beberapa aspek seperti:

- proporsi APBD dan anggaran pengelolaan persampahan, antara retribusi dan biaya pengelolaan persampahan,
- proporsi komponen biaya tersebut untuk gaji, transportasi, pemeliharaan, pendidikan dan pengembangan serta administrasi,
- proporsi antara retribusi dengan pendapatan masyarakat,

- struktur dan penarikan retribusi yang berlaku.

Retribusi persampahan merupakan bentuk konkret partisipasi masyarakat dalam membiayai program pengelolaan persampahan. Bentuk penarikan dapat dibenarkan bila pelaksanaannya adalah badan formal yang diberi kewenangan oleh pemerintah.

5) *Pengaturan*

Aspek pengaturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, serta ketertiban masyarakat.

6) *Peran serta masyarakat*

Tanpa adanya partisipasi masyarakat, semua program pengelolaan sampah (kebersihan) yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program tersebut. Hal tersebut menyangkut:

- Bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar, dan merata.
- Faktor-faktor sosial, struktur, dan budaya setempat.
- Kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini.

2.2.4 Swastanisasi Sampah

Swastanisasi sampah merupakan suatu manajemen pengelolaan dan penanganan sampah oleh pihak swasta yang berperan sebagai penanam investasi sekaligus pelaksanaannya. Swastanisasi persampahan harus dilakukan melalui tender, agar

penunjukkan perusahaan pemenangnya dapat diterima secara transparan. Program ini bersifat profesional, yakni mengutamakan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

Swastanisasi sampah ini merupakan alternatif dimana dalam pengelolaan ini swasta dan masyarakat dilibatkan secara aktif untuk mendukung program ini. Dengan swastanisasi, pemerintah bisa segera mengajukan klaim kepada swasta sebagai pengelolanya berupa sanksi atau denda, bila kasus seperti LPA Bantargebang terjadi. Keberhasilan program swastanisasi sampah di Kuala Lumpur (Malaysia) dan Singapura dapat memberikan inspirasi bagi Pemda DKI untuk mencontoh program tersebut.

Keberhasilan di kedua kota tersebut misalnya setiap rumah tangganya mendukung penuh program ini dengan penuh kesadaran mereka memilah sampah ke dalam dua jenis kantong, satu untuk sampah organik dan lainnya untuk sampah non organik. Sampah organik langsung dibawa petugas kebersihan ke pabrik kompos, sedangkan sampah non organik dibawa ke pabrik pengolahan daur ulang. Swastanisasi sampah dapat dilakukan oleh gabungan antara pemerintah dan swasta melalui *build, operates, and transfer* (BOT) atau kerjasama operasi (KSO). Selain itu, swastanisasi juga harus melakukan prinsip subsidi silang, dimana masyarakat golongan atas harus dapat mensubsidi golongan menengah dan golongan bawah melalui kebijaksanaan tarifnya.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui memposisikan masyarakat sebagai aktor penting dalam keterlibatan pada pembangunan dan memberi pengetahuan/penyadaran kepada masyarakat tentang kondisi lingkungannya.

Melatih masyarakat dalam pengelolaan kegiatan secara berkelompok (dapat melalui *Community Based Organization/ CBO*) yang nantinya berperan dalam kegiatan pembangunan di lingkungannya.

Melatih masyarakat untuk berupaya mengatasi permasalahan melalui pola pembimbingan sehingga nantinya masyarakat akan mampu berperan sebagai pemberdaya untuk anggota kelompoknya.

Melatih masyarakat dalam menyusun program kegiatan berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, pendanaan sampai tahap pelaksanaan dan evaluasinya.

Melatih masyarakat dalam mengajukan program kepada pemerintah (*city authority/local authority*), swasta (*private*) atau lembaga lain sebagai pemberi dana untuk kemudian dalam pemeliharannya dilanjutkan oleh masyarakat sendiri.

Pembangunan masyarakat (*community development*) memiliki focus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pembangunan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi pihak-pihak yang bertanggung jawab (Payne, 1995:165).

Pembangunan masyarakat (*community development*) terdiri dari dua konsep, yaitu 'pembangunan dan masyarakat'. Secara singkat pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu (Maryo, M, 1994):

1. Masyarakat sebagai tempat bersama, yaitu serbuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan,
2. Masyarakat sebagai kepentingan bersama, yaitu kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan keadaan khusus (cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Pembangunan masyarakat (*community development*) yang berbasis masyarakat seringkali diartikan dengan pelayanan sosial gratis dan swadaya yang biasanya muncul sebagai respon terhadap melebarnya kesenjangan antara menurunnya jumlah pemberi pelayanan dengan meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan pelayanan. Selanjutnya pembangunan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metoda yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.

Realita pengalaman pembangunan menunjukkan kecenderungan bahwa yang terjadi adalah masyarakat di lapisan bawah tidak selalu dapat menikmati hasil pembangunan seperti apa yang diharapkan, sehingga berdampak timbulnya kesenjangan.

Demikian halnya pada pembangunan lingkungan, yang merupakan salah satu kebutuhan primer (di luar sandang dan pangan); tingkat kerumitannya memerlukan perhatian secara khusus. Beberapa kebijaksanaan lingkungan yang menjadi dasar pertimbangan adalah strategi penyediaan dan *controlling* oleh pemerintah bergeser dari peran sebagai penyedia/*provider* menjadi peran sebagai pemampu/*enabler*. Arah tersebut memandang perlu adanya pemihakan dan pemberdayaan bagi masyarakat golongan rendah. Hal yang

paling mendasar untuk dapat melakukan pemihakan dan pemberdayaan adalah dengan mengadakan bentuk kemitraan.

2.3.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Secara riil tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah:

Menumbuhkan suatu masyarakat/komunitas yang lebih produktif.

Memiliki inisiatif untuk mengembangkan diri.

Mampu berkomunikasi terhadap langkah-langkah perbaikan.

Memberikan akses dengan sumber daya di luar komunitas.

Berani menempatkan diri pada posisi yang setara dengan kelompok di luar komunitas (dengan berbagai pihak; pemerintah dan swasta dalam bentuk kemitraan).

2.3.2 Langkah-langkah Penanganan Pemberdayaan

Pemberdayaan yang akan dilakukan memerlukan langkah-langkah yang riil dalam penanganannya. Langkah-langkah yang diambil dalam mewujudkan tujuan di atas adalah:

a) Membentuk iklim yang Memungkinkan Masyarakat Berkembang

Dua hal yang mendasar dalam membentuk iklim bagi masyarakat adalah menyadarkan masyarakat dan memberikan dorongan/motivasi untuk berkembang. Proses menyadarkan masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mengenal kawasannya melalui survey dan analisa. Proses ini disebut dengan *participatory survey and participatory analysis*.

Sedangkan dalam hal memotivasi masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk menggambarkan dan merencanakan kawasan, yang disebut dengan *participatory design and planning*. Pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat secara psikologis akan memberikan rasa keberpihakan kepada masyarakat.

b) Memperkuat Potensi yang Ada

Memperkuat (*empowerment*) dilakukan dengan mengorganisasi masyarakat dalam kelompok-kelompok/komunitas pembangun, yang selanjutnya dikembangkan dengan memberikan masukan-masukan/input serta membuka berbagai peluang-peluang berkembang sehingga masyarakat semakin berdaya.

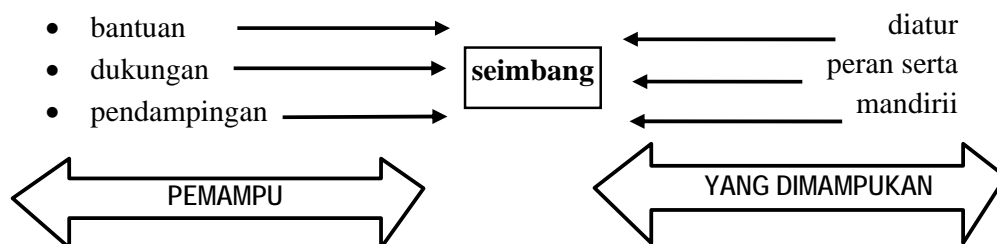
c) Proses Perlindungan (Pendampingan)

Pengertian perlindungan tidak diarahkan pada proteksi, tetapi perlindungan untuk tetap bertahan dalam kerangka tatanan positif yang telah ada pada masyarakat. Pendampingan lebih ditekankan pada proses aksi dari masyarakat untuk menjadi lebih berdaya. Proses aksi yang dilakukan dengan memberikan wawasan dan alternatif-alternatif yang dapat dimengerti dan mampu dilakukan oleh masyarakat sendiri, mulai dari pemberian model/ccontoh hingga pola-pola yang dapat dilakukan kembali oleh masyarakat (*sustainable*).

2.3.3 Metoda yang Digunakan dalam Penanganan Pemberdayaan

a) Peran Partisipasi Masyarakat

Peran partisipasi mengarah pada pembentukan iklim perimbangan antara peran “pemampu” dan peran “dimampukan”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

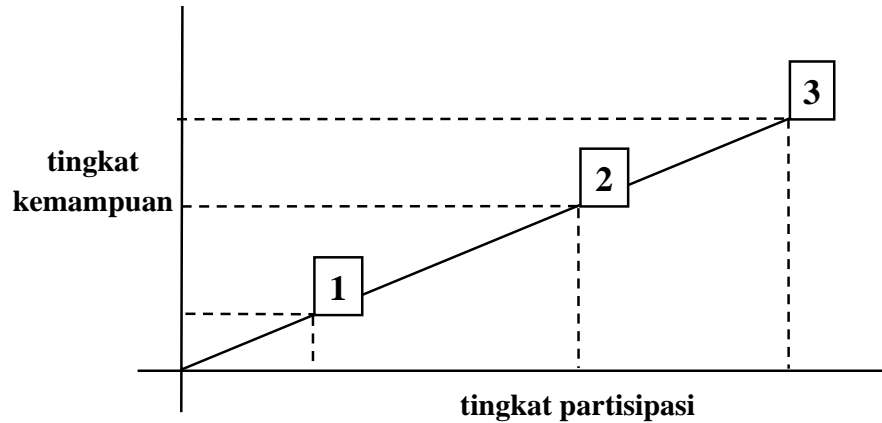


(Wiryanto, 1986)

GAMBAR 2.2
DIAGRAM PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT

b) Proses *Incremental*

Proses pendampingan yang dilakukan mengarah pada perbaikan atau peningkatan tingkat kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi.

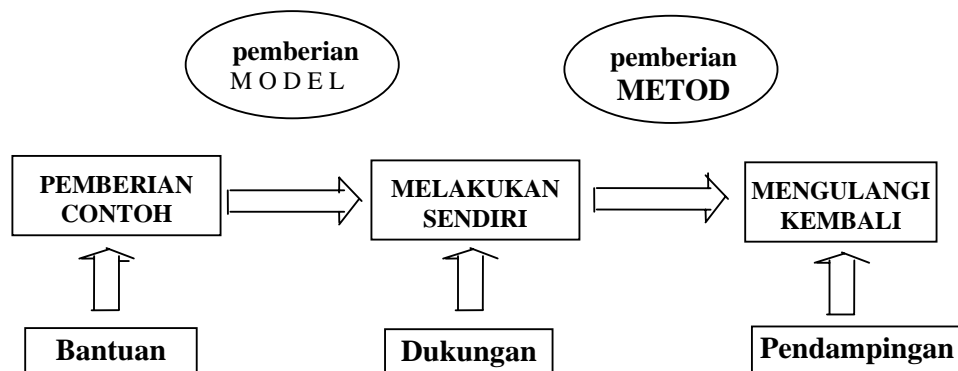


(Sumber : Analisa 2006)

GAMBAR 2.3
BAGAN PROSES INCREMENTAL DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT

c) *Sustainable*

Keberlanjutan program/aksi yang dapat dilakukan masyarakat menunjukkan tingkat kedewasaan masyarakat untuk berperan dalam pembangunan.



(Wiryanto, 1986)

GAMBAR 2.4
SUSTAINABLE PROGRAM DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT

Ringkasan Kajian Teori

TABEL II.3
RINGKASAN KAJIAN TEORI

No	Teori	Sumber	Kegunaan	Out Put
1	Teori Pembangunan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> – UU. No 4 /1992 – Eko Budiharjo, 1999, Kota Berkelanjutan, Bandung, Alumni 	Analisis Kondisi Fisik Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> – Jenis Perumahan – Tipe Perumahan – Lokasi perumahan
2	Teori Fasilitas Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> – Djoko Sujarto, 1989 – SK SNI No. T.13 1990-F – Cipta Karya, 1999 – Sudarso, 1995, pembuangan Sampah, Jakarta, Depkes. 	<ul style="list-style-type: none"> – Analisis Jenis Sampah. – Analisis Produksi Sampah – Analisis Komponen-komponen dalam Pengelolaan dan Penanganan Sampah. 	<ul style="list-style-type: none"> –Jenis Sampah yang dihasilkan tiap perumahan. –Jumlah timbunan sampah yang dihasilkan tiap keluarga dalam perumahan. –Organisasi dan manajemen dalam pengelolaan persampahan. –Teknik operasional dalam pengelolaan sampah, yang meliputi sistem pengumpulan, sistem pemisahan, sistem pemindahan, sistem pengangkutan, sistem pengolahan dan sistem pembuangan
3	Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan ▪ Teori Peran serta Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> – Ahmad Abu, 1999, Psikologi Sosial, Jakarta, rineka Cipta. – Cipta Karya, 1999. – Conyer Diana, 1994, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar, Yogyakarta, Gama Press – Sears, david, Froedman Jonathan, % peplav Anne, 1985, psikologi Sosial, Jakarta, Erlangga. 	<ul style="list-style-type: none"> – Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah. – Analisis Faktor sosial. Struktur dan budaya masyarakat perumahan setempat. – Analisis Kebiasaan dalam Pengelolaan Sampah selama ini. 	<ul style="list-style-type: none"> –Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah –Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Sumber: Analisi, 2006

BAB III

KAWASAN PERUMAHAN

DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

3.1 Perkembangan Kecamatan Pedurungan Terhadap Kota Semarang

3.1.1 Administrasi Dan Fisik alami

Secara geografis Kecamatan Pedurungan Kota Semarang mempunyai luas wilayah sebesar 2.072,01 Ha dengan batas-batas sebagai berikut: (untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang).

- Sebelah Barat : Kecamatan Gayamsari
- Sebelah Timur : Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tembalang
- Sebelah Utara : Kecamatan Genuk

3.1.2 Demografi dan Sosial Budaya

Jumlah penduduk di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2004 sebanyak 145.001 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 11.61%. Pada tabel berikut dilihat rata-rata pertumbuhan penduduk selama 2 tahun terakhir sebesar angka pertumbuhan tertinggi di Kelurahan Tlogosari Wetan sebesar 4.543 jiwa (22,09%) dan pertumbuhan paling rendah di Kelurahan Pedurungan Kidul sebesar 9.100 jiwa (6.30%).

TABEL III.1
BESARNYA PERTUMBUHAN PENDUDUK
KECAMATAN PEDURUNGAN TAHUN 2004

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan (%)
		2003	2004	
1	Gemah	11.893	12.993	9.25
2	Pedurungan Kidul	8.561	9.100	6.30
3	Plamongsari	10.350	11.059	6.85
4	Penggaron Kidul	3.574	4.083	12.98
5	Pedurungan Lor	5.22	5.935	13.65
6	Tlogomulyo	7.805	9.158	17.34
7	Pedurungan Tengah	8.670	9.649	11.29
8	Palebun	11.144	12.426	11.50
9	Kalicari	6.377	7.102	11.37
10	Tlogosari Kulon	28.761	32.529	13.10
11	Tlogosari Wetan	3.721	4.543	22.09
12	Muktiharjo Kidul	23.845	26.469	11.00
Jumlah		129.923	145.001	11.61

Sumber: Kecamatan Pedurungan Dalam Angka, 2004

Jumlah penduduk Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebanyak 145.001 jiwa dengan luas wilayah sebesar 2.072,01 Ha maka kepadatan penduduk rata-rata sebesar 7 jiwa/Ha. Tabel berikut merupakan rincian kepadatan penduduk Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2004 yang dirinci tiap desa/kelurahan.

TABEL III.2
KEPADATAN PENDUDUK
KECAMATAN PEDURUNGAN TAHUN 2004

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/ha)
1	Gemah	1,01	12.993	12
2	Pedurungan Kidul	1,80	9.100	5
3	Plamongsari	2,35	11.059	5
4	Penggaron Kidul	2,01	4.083	2
5	Pedurungan Lor	1,36	5.935	4
6	Tlogomulyo	1,94	9.158	5
7	Pedurungan Tengah	1,89	9.649	5
8	Palebun	1,47	12.426	8
9	Kalicari	0,80	7.102	9
10	Tlogosari Kulon	2,81	32.529	12
11	Tlogosari Wetan	1,26	4.543	4
12	Muktiharjo Kidul	1,26	26.469	13
Jumlah		19.96	145.001	7

Sumber: Kecamatan Pedurungan Dalam Angka, 2004

Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk per jiwa per rumah tangga tertinggi di Kelurahan Tlogosari Kulon, sebesar 7.307 rumah tangga dan terkecil di Kelurahan Penggaron Kidul sebesar 4.083 rumah tangga. Selanjutnya kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL III.3
RATA-RATA JIWA PER RUMAH TANGGA
KECAMATAN PEDURUNGAN TAHUN 2004

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/ha)
1	Gemah	12,993	2.709	5
2	Pedurungan Kidul	9,100	2.554	4
3	Plamongansari	11,059	2.713	4
4	Penggaron Kidul	4,083	1.002	4
5	Pedurungan Lor	5,835	1.467	4
6	Tlogomulyo	9,158	2.167	4
7	Pedurungan Tengah	9,649	2.566	4
8	Palebon	12,426	2.786	4
9	Kalicari	7,102	1.874	4
10	Tlogosari Kulon	32,529	7.307	4
11	Tlogosari Wetan	4,543	974	5
12	Muktiharjo Kidul	26,469	5.885	4
Jumlah		145.001	34.024	4

Sumber: Kecamatan Pedurungan Dalam Angka, 2004

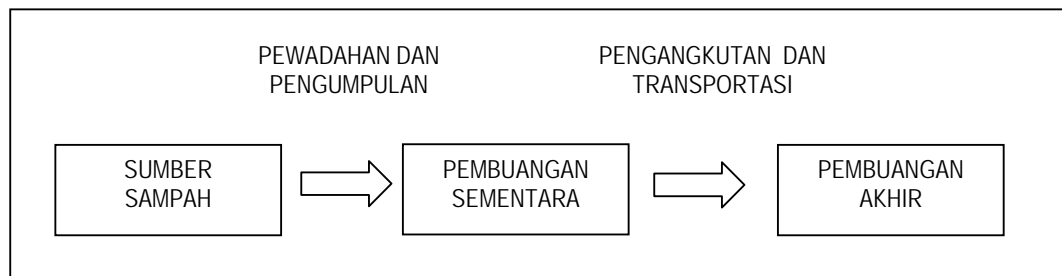
3.2 Pola Pemenuhan Fasilitas Umum Persampahan

3.2.1 Pola Penanganan Persampahan di Kecamatan Pedurungan

Prinsip pengelolaan persampahan adalah membersihkan kota dari sampah serta mengamankan sampah agar tidak mencemari lingkungan. Sedangkan definisi penanganan sampah adalah perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan lingkungan, yang dapat berbentuk membuang sampah saja atau menegmebalikan (*recycling*) sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Selanjutnya pada bagian ini menjelaskan pelaksanaan pengelolaan persampahan mulai tahap pewadahan hingga pembuangan akhir di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

a) Pola Pengelolaan Persampahan

Pola pengelolaan persampahan yang ada meliputi: pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir:



Sumber: Dinas Persampahan dan Pertamanan Kota Semarang, 2004

GAMBAR 3.4
POLA MANAJEMEN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

b) Pewadahan

Tahap paling awal dalam penanganan masalah persampahan yang terkait langsung dengan sumber sampah adalah pewadahan. Aktifitas pewadahan secara fisik dapat berupa wadah komunal atau individual dengan berbagai ukuran. Alat pewadahan yang digunakan untuk penampungan sampah sebagian besar menggunakan sistem tidak tetap dan penyediaannya oleh masyarakat sendiri. Sampai saat ini tidak ada standartisasi pewadahan bagi masyarakat kecuali fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemda pada beberapa tempat. Sistem pewadahan masih bergantung pada kemampuan masyarakat dimana masih ada yang mempergunakan keranjang, kantong plastic, maupun tong-tong sampah ataupun bak-bak tertutup. Setelah sampah terwadahi secara layak, maka persampahan tersebut dikumpulkan ke suatu tempat sementara, sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir.

TABEL III.5
KOMPOSISI SAMPAH DI KECAMATAN PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2004

No	Komposisi	Prosentase (%)
1	Organik	61,95
2	Non Organik	12.26
	a. Kertas	1.72
	b. Kaca	13.39
	c. Plastik	1.80
	d. Logam	1.55
	e. Kain	0.50
	f. Karet	6.83
	Jumlah	100.00

Sumber: Kecamatan Pedurungan, 2004

c) Pengumpulan

Setelah kegiatan pewadahan maka dilakukan kegiatan pengumpulan secara berbeda-beda tergantung lokasi sumber limbah. Secara terperinci, sistem pengumpulan persampahan di perkotaan berdasarkan masing-masing lokasi adalah sebagai berikut:

- **Daerah Permukiman**, yang sudah teratur diterapkan pola pengumpulan individu tidak langsung, persampahan dari tingkat pewadahan diambil oleh petugas dengan menggunakan alat angkut becak/ gerobak sampah untuk dibawa ke TPS atau Container untuk selanjutnya diangkut ke TPA. Pemukiman yang belum teratur menggunakan pola pengumpulan komunal tidak langsung, masyarakat membuang sendiri sampahnya ke TPS yang kemudian diangkut oleh alat angkut sampah ke TPA. Beberapa daerah permukiman yang tidak mendapatkan pelayanan sampah membakar sendiri sampahnya atau membuangnya ke saluran air.
- **Sampah Pasar**, disapu dan dikumpulkan oleh dinas pasar. Penyapuan dilakukan pada pagi, siang, dan sore/ malam hari. Sampah diangkut dengan menggunakan gerobak sampah dan dikumpulkan ke TPS Pasar. TPS biasanya berupa container namun untuk pasar yang jumlah persampahan dan luas wilayahnya besar digunakan bak terbuka sebagai tempat pembuangan sementara. Sampah kemudian diangkut oleh dinas

kebersihan ke TPA. Untuk pasar modern atau mall, sampah dikumpulkan oleh petugas pengelola mal ke TPS dekat mal untuk diangkut oleh Dinas Kebersihan atau Swasta ke TPS.

- ***Sampah Komersial***, seperti : pertokoan, restoran, dan hotel. Sampah dikumpulkan di dalam tong-tong sampah untuk kemudian diangkut oleh petugas kebersihan ke tempat penampungan sementara.
- ***Pengumpulan Sampah Terminal*** dilakukan oleh beberapa pihak tergantung pada lokasi terminal tersebut. Terminal yang berada dekat dengan pasar, sampah dikumpulkan dan diangkut oleh petugas kebersihan. Terminal yang berdekatan dengan pemukiman, petugas pengumpulan menjadi satu dengan petugas kebersihan kawasan permukiman. Tempat pengumpulan bisa berupa *container*, bak terbuka atau lahan kosong di sekitar terminal.
- ***Sampah Rumah Sakit dan Puskesmas***, terdiri dari sampah medis dan non medis. Sampah medis langsung menggunakan cara dibakar atau ditanam, sedangkan sampah non medis dimasukkan ke dalam tong sampah untuk diangkut petugas kebersihan yang selanjutnya dibuang ke pembuangan akhir.
- ***Penyapuan Jalan-jalan protokol***, untuk daerah perkotaan biasanya diserahkan pada pihak swasta dengan lingkup pekerjaan :
 1. Penyapuan badan jalan, berem, trotoar, dan taman disekitarnya.
 2. Pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA
 3. Pembersihan got-got/ selokan disekitarnya.
- ***Sampah Industri***, berasal dari proses industri dan kantor. Beberapa industri mengelola sendiri persampahannya dengan cara dibakar atau mengumpulkan sampahnya dan mengangkut sendiri ke TPA. Untuk industri kecil yang berdekatan

dengan permukiman seperti industri tempe atau kerupuk, persampahan dikumpulkan oleh petugas kebersihan yang sama dengan petugas kebersihan kampung (Dinas Persampahan dan Pertamanan Kota Semarang, 2004).

TABEL III.6
PRODUKSI/TIMBUNAN SAMPAH DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA
SEMARANG TAHUN 2004

No	Sumber	Jumlah Timbunan Per-Hari (M ³)	Prosentase (%)
1	Permukiman/Rumah Tangga	2.850 M ³	66.69
2	Pasar	482 M ³	11.27
3	Komersial (Pertokoan, restoran, hotel)	198 M ³	4.63
4	Fasilitas Umum	96 M ³	2.24
5	Sapuan Jalan	179 M ³	4.18
6	Kawasan Industri (Non B.3)	376 M ³	8.81
7	Saluran	93 M ³	2.18
		4.274 M ³	100

Sumber: Kecamatan Pedurungan dan Dinas Persampahan dan Pertamanan Kota Semarang, 2004

d) Pengangkutan

Yang dimaksud pengangkutan persampahan disini ialah pengangkutan persampahan dari container atau tempat pembuangan sampah (depo) ke pembuangan akhir untuk selanjutnya dimusnahkan. Frekuensi pengangkutan ini dapat bervariasi, untuk daerah-daerah menengah ke atas lebih sering dibandingkan dengan daerah lainnya, misalnya 2 kali sehari. Sedangkan untuk kawasan lainnya 1 kali sehari tetapi hendaknya dipahami apabila kurang dari 1 kali sehari menjadi tidak baik karena persampahan yang tinggal lebih dari 1 hari dapat mengalami proses pembusukan, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.

Masalah yang timbul dalam kegiatan pengangkutan ini ialah waktu pengangkutan yang tidak mungkin serentak dilakukan pada setiap tempat. Ada kemungkinan pada waktu kendaraan pengangkut datang belum ada sampah yang terkumpul pada tempat pengumpulan. Hal ini berkaitan dengan sikap mental dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan persampahan.

Kegiatan pengangkutan sampah dimulai dari kegiatan mengangkut sampah dari titik kumpul ke atas kendaraan pengangkut dan selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan akhir. Kendaraan pengangkut sampah yang ada untuk Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yaitu:

- **Truk-truk besar** operasi pengangkutan sampah ke atas kendaraan maupun pengeluaran dari kendaraan angkut harus dilaksanakan secara manual. Hal ini sangat tidak diinginkan karena dapat berbahaya bagi kesehatan pekerja.
 - **Tipe truck**. Truk ini dapat membuang sampah yang ada padanya secara otomatis yang digerakkan secara hidrolik. Pada waktu pengisian ke atas kendaraan dapat dikombinasikan penggunaannya dengan wheel loader.
 - **Compactor Truck**. Truk ini diisi sampah kemudian dipadatkan sehingga volumenya kecil dan dibawa ke pembuangan akhir. Keuntungan ialah volume sampah menjadi kecil. Tetapi di dalam truk bebannya menjadi berat, sehingga perlu dipertimbangkan tentang kapasitas jalan yang dilalui sebelum memutuskan memakai alat ini. Apabila tidak sinkron maka kerusakan jalan akan terjadi dan akan menimbulkan masalah baru.
- Selanjutnya daftar inventaris armada sampah yang dapat dilihat pada tabel III.8 Daftar Inventarisasi Armada Pengangkut Sampah Operasional Pedurungan.

e) **Pembuangan Akhir**

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dan berbagai jenis yang telah dikumpulkan dari seluruh pelosok kota dan diangkut ke tempat pembuangan akhir tersebut. Bentuk pembuangan akhir ini bermacam-macam,

tergantung pada situasi dan kondisi kota kota yang mengelola pembuangan sampah tersebut dan juga kondisi kemampuan suatu kota.

3.3 Kawasan Perumahan di Kecamatan Pedurungan.

Kawasan perumahan yang dibangun oleh sektor informal yang menjadi obyek penelitian ini adalah perumahan Griya Arteri Sari, Medoho Indah, Medoho Asri, Pedurungan Baru, Graha Mutiara Semarang, Perumahan Pondok Indah. Lokasi perumahan ini di Kecamatan Pedurungan dapat dilihat pada Gambar 3.2.

3.3.1 Perumahan Gria Arteri Sari

3.3.2.1 Kondisi Fisik Perumahan, Lokasi dan Jumlah Hunian

Perumahan Gria Arteri Sari merupakan perumahan yang dibangun akhir tahun 2004 dengan tipe 45/103 dan 60/126. Lokasi perumahan berada di jalan Malangsari Raya, Pedurungan. Perumahan ini terletak pada daerah yang cukup strategis karena dekat dengan jalan arteri Soekarno-Hatta Pedurungan Semarang Timur. Jumlah hunian dalam perumahan Gria arteri sari adalah 70 rumah dengan kurang lebih 30 KK atau sama dengan 130 jiwa.



Foto Desember 2005

**GAMBAR 3.3
TIPE HUNIAN GRIA ARTERI SARI**

3.3.1.2 Fasilitas Persampahan

PENGGOLONGAN DAN KARAKTERISTIK SAMPAH

Berdasarkan asalnya Jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat penghuni perumahan Gria Arteri Sari adalah sampah dari hasil kegiatan rumah tangga. Apabila dilihat dari komposisinya jenis sampah yang dihasilkan oleh perumahan Gria Arteri Sari adalah sampah yang seragam yaitu sampah dari kegiatan rumah tangga, yaitu kertas, daun, plastik, makanan, kaleng. Hal ini menunjukkan berdasarkan bentuknya jenis sampah ini merupakan sampah yang berbentuk padatan (solid).

Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya, maka sampah di perumahan Gria Arteri Sari ini merupakan sampah daerah, yaitu daerah pemukiman penduduk. Berdasarkan proses terjadinya, jenis sampah pada perumahan ini terdiri atas dua hal yaitu sampah alami dan sampah non alami. Sampah alami adalah sampah yang terjadi karena proses alami, dalam hal ini adalah rontoknya daun-daun pada pohon di perumahan ini, sedangkan sampah yang non alami disini adalah sampah yang terjadi karena kegiatan manusia, antara lain sampah sisa makanan, guntingan kertas, plastik pembungkus makanan, kaleng susu/cat, dll.

Penggolongan sampah pada perumahan Gria Arteri Sari berdasarkan sifatnya merupakan campuran antara sampah organik dan non organik, yang meliputi daun, kayu, kertas, karon, sisa makanan, sayur, buah, kaleng, plastik, gelas. Sedangkan berdasarkan jenisnya sampah di perumahan ini meliputi sampah makanan, sampah kertas, sampah plastik.

PRODUKSI SAMPAH

Produksi sampah di Perumahan Gria Arteri sari dalam hal ini volume sampah sebesar
 $2,25 \text{ orang/hari} \times 130 \text{ orang} = 292.5 \text{ liter/hari}$.

KOMPONEN-KOMPONEN DALAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH

1. ORGANISASI DAN MANAJEMEN

- Peraturan pemerintah yang membinanya

Penanganan masalah sampah pada permukiman ini dibina oleh lingkungan RT/RW. Dalam arti dikelola masyarakat perumahan melalui iuran warga yang dikoordinir lewat ketua RT setempat.

- Pola operasional yang diterapkan

Operasional yang dilakukan petugas dijadwalkan oleh pihak RT dalam seminggu mengangkut sampah tiap hari pada waktu pagi hari.

- Lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani

Ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan oleh pihak perumahan, adalah pengumpulan sampah dari tong-tong sampah warga yang telah tersedia di setiap depan rumah, dan mengangkutnya menuju TPS di Tlogosari wetan.

- Sistem pembiayaan

Pembiayaan pengangkutan sampah oleh petugas pengumpul sampah di perumahan Gria Arteri sari dari iuran warga. Petugas sanpah digaji Rp. 7500 per KK.

2. TEKNIK OPERASIONAL

- Sistem Pengumpulan

Kegiatan pengumpulan sampah di perumahan Gria Arteri sari Semarang memiliki pola individual, yaitu pengumpulan sampah oleh petugas sampah dari rumah ke rumah dengan alat angkut gerobak sampah, untuk kemudian diangkut menuju ke TPS.

- Sistem Pemisahan

Pada perumahan ini tidak menganut sistem pemisahan sampah non organik dan organik. Semua sampah bercampur jadi satu tanpa dipisahkan menurut jenisnya maupun keperluannya.

- Sistem pemindahan

Sistem pemindahan sampah dari perumahan ini adalah pola sistem yang dapat diangkat maupun dipindahkan, karena sampah berada pada bak sampah yang terbuat dari ban bekas atau tong sampah yang dapat diangkat, namun sebagian memakai sistem permanen, yaitu tempat sampah yang bersifat permanen seperti halnya bak terbuka dari pasangan batu-bata.

- Sistem pengangkutan

Sistem pengangkutan sampah pada perumahan ini adalah pengangkutan dengan sistem/pola door to door, yaitu diambil dari rumah ke rumah oleh petugas sampah.

- Sistem Pembuangan

Kegiatan pembuangan sementara sampah saat ini oleh warga penghuni perumahan pada TPS Tlogosari Wetan.

- Tempat Pembuangan Akhir.

Pembuangan akhir dari sampah di Perumahan dilakukan oleh DKP Pemerintah Kota Semarang dan dibuang pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang.

3.3.2 Perumahan Medoho Indah

3.3.2.1 Kondisi Fisik Perumahan, Lokasi dan Jumlah Hunian

Perumahan Medoho Indah merupakan perumahan dengan tipe bangunan 36 dan 45. Lokasi perumahan tersebut berada di Jalan Medoho Raya Kelurahan Gajah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Jumlah hunian dalam perumahan Perumahan Medoho Indah adalah 90 Rumah, dengan 75 Kepala Keluarga (KK)= 210 Jiwa.



Foto Desember, 2005

GAMBAR 3.4
TIPE HUNIAN MEDOHO INDAH

3.3.2.2 Tingkat Pelayanan Persampahan

A. PENGGOLONGAN DAN KARAKTERISTIK SAMPAH

Berdasarkan asalnya Jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat penghuni perumahan Medoho Indah adalah sampah dari hasil kegiatan rumah tangga. Apabila dilihat dari komposisinya jenis sampah yang dihasilkan oleh perumahan Medoho Indah adalah sampah yang seragam yaitu sampah dari kegiatan rumah tangga, yaitu kertas, daun, plastik, makanan, kaleng. Hal ini menunjukkan berdasarkan bentuknya jenis sampah ini merupakan sampah yang berbentuk padatan (*solid*). Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya, maka sampah di perumahan Medoho Indah ini merupakan sampah daerah, yaitu daerah pemukiman penduduk. Berdasarkan proses terjadinya, jenis sampah pada perumahan ini terdiri atas dua hal yaitu sampah alami dan sampah non alami. Sampah alami adalah sampah yang terjadi karena proses alami, dalam hal ini adalah rontoknya daun-daun pada pohon di perumahan ini, sedangkan sampah yang non alami disini adalah sampah yang terjadi karena kegiatan manusia, antara lain sampah sisa makanan, guntingan kertas, plastik pembungkus makanan, kaleng susu/ cat, dll.

Penggolongan sampah pada perumahan Medoho Indah berdasarkan sifatnya merupakan campuran antara sampah organik dan non organik, yang meliputi daun, kayu, kertas, karon, sisa makanan, sayur, buah, kaleng, plastik, gelas. Sedangkan berdasarkan jenisnya sampah di perumahan ini meliputi sampah makanan, sampah kertas, sampah plastik.

B. Produksi Sampah

Produksi sampah di Perumahan Medoho Indah volume sampah yang dihasilkan sebesar $2,25 \text{ orang/hari} \times 210 \text{ orang} = 472.5 \text{ liter/hari}$

C. KOMPONEN-KOMPONEN DALAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH ORGANISASI DAN MANAJEMEN

- Peraturan pemerintah yang membinanya

Penanganan masalah sampah pada permukiman ini dibina oleh lingkungan RT/RW. Dalam arti dikelola masyarakat perumahan melalui iuran warga yang dikoordinir lewat ketua RT setempat.

- Pola operasional yang diterapkan

Operasional yang dilakukan petugas dijadwalkan oleh pihak RT dalam seminggu mengangkut sampah 2 x pada waktu pagi hari.

- Lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani

Ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan oleh pihak perumahan, adalah pengumpulan sampah dari tong-tong sampah warga yang telah tersedia di setiap depan rumah, dan mengangkutnya menuju TPS di Gempolsari.

- Sistem pembiayaan

Pembiayaan pengangkutan sampah oleh petugas pengumpul sampah di perumahan dari iuran warga. Petugas sampah digaji Rp. 5000 per KK.

TEKNIK OPERASIONAL

- Sistem Pengumpulan

Kegiatan pengumpulan sampah di perumahan ini memiliki pola individual, yaitu pengumpulan sampah oleh petugas sampah dari rumah ke rumah dengan alat angkut gerobak sampah, untuk kemudian diangkut menuju ke TPS.

- Sistem Pemisahan

Pada perumahan ini tidak menganut sistem pemisahan sampah non organik dan organik. Semua sampah bercampur jadi satu tanpa dipisahkan menurut jenisnya maupun keperluannya.

- Sistem pemindahan

Sistem pemindahan sampah dari perumahan ini adalah pola sistem yang dapat diangkat maupun dipindahkan, karena sampah berada pada bak sampah yang terbuat dari ban bekas atau tong sampah yang dapat diangkat, namun sebagian memakai sistem permanen, yaitu tempat sampah yang bersifat permanen seperti halnya bak terbuka dari pasangan batu-bata.

- Sistem pengangkutan

Sistem pengangkutan sampah pada perumahan ini adalah pengangkutan dengan sistem/pola *door to door*, yaitu diambil dari rumah ke rumah oleh petugas sampah.

- Sistem Pembuangan

Kegiatan pembuangan sementara sampah saat ini oleh warga penghuni perumahan pada TPS Gempolsari, namun sebagian oleh penduduk setempat ada beberapa yang membakar sampah pada tanah kosong yang ada di lokasi perumahan tersebut. Hal ini masih berlanjut meskipun pemilik tanah keberatan ada pembakaran sampah ditanah miniknya.

3.3.3 Gria Medoho Asri

3.3.3.1 Kondisi Fisik Perumahan, Lokasi dan Jumlah Hunian

Gria Medoho Asri merupakan perumahan dengan bangunan tipe 45 dan 60. Lokasi perumahan berada di jalan Medoho Raya Kelurahan Gajah Kecamatan Pedurungan. Jumlah hunian dalam perumahan Perumahan Medoho Asri adalah 45 Rumah, dengan perincian 30 KK=132 Jiwa.



Foto Desember 2005

**GAMBAR 3.5
TIPE HUNIAN GRIA MEDOHO ASRI**

3.3.3.2 Tingkat Pelayanan Persampahan

A. PENGGOLONGAN DAN KARAKTERISTIK SAMPAH

Berdasarkan asalnya Jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat penghuni perumahan Gria Medoho Asri adalah sampah dari hasil kegiatan rumah tangga. Apabila dilihat dari komposisinya jenis sampah yang dihasilkan oleh perumahan Gria Medoho Asri adalah sampah yang seragam yaitu sampah dari kegiatan rumah tangga, yaitu kertas, daun, plastik, makanan, kaleng. Hal ini menunjukkan berdasarkan bentuknya jenis sampah ini merupakan sampah yang berbentuk padatan (solid).

Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya, maka sampah di perumahan Gria Medoho Asri ini merupakan sampah daerah, yaitu daerah pemukiman penduduk. Berdasarkan proses terjadinya, jenis sampah pada perumahan ini terdiri atas dua hal yaitu sampah alami dan sampah non alami. Sampah alami adalah sampah yang terjadi karena proses alami, dalam hal ini adalah rontoknya daun-daun pada pohon di perumahan ini, sedangkan sampah yang non alami disini adalah sampah yang terjadi karena kegiatan manusia, antara lain sampah sisa makanan, guntingan kertas, plastik pembungkus makanan, kaleng susu/ cat dan lain-lain.

B. Produksi Sampah

Produksi sampah di Perumahan Gria Medoho Asri, volume sampah yang dihasilkan sebesar $2,25 \text{ orang/hari} \times 132 \text{ orang} = 297 \text{ liter/hari}$

C. KOMPONEN-KOMPONEN DALAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH ORGANISASI DAN MANAJEMEN

- Peraturan pemerintah yang membinanya

Penanganan masalah sampah pada permukiman ini dibina oleh lingkungan RT/RW. Dalam arti dikelola masyarakat perumahan melalui iuran warga yang dikoordinir lewat ketua RT setempat.

- Pola operasional yang diterapkan

Operasional yang dilakukan petugas dijadwalkan oleh pihak RT dalam seminggu mengangkut sampah tiap hari pada waktu pagi hari.

- Lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani

Ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan oleh pihak perumahan, adalah pengumpulan sampah dari tong-tong sampah warga yang telah tersedia di setiap depan rumah, dan mengangkutnya menuju TPS yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang.

- Sistem pembiayaan

Pembiayaan pengangkutan sampah oleh petugas pengumpul sampah di perumahan Gria Medoho Asri dari iuran warga. Petugas sampah digaji Rp. 7500 per KK.

TEKNIK OPERASIONAL

- Sistem Pengumpulan

Kegiatan pengumpulan sampah di perumahan Gria Medoho Asri Semarang memiliki pola individual, yaitu pengumpulan sampah oleh petugas sampah dari rumah ke rumah dengan alat angkut gerobak sampah, untuk kemudian diangkut menuju ke TPS.

- Sistem Pemisahan

Pada perumahan ini tidak menganut sistem pemisahan sampah non organik dan organik. Semua sampah bercampur jadi satu tanpa dipisahkan menurut jenisnya maupun keperluannya.

- Sistem pemindahan

Sistem pemindahan sampah dari perumahan ini adalah pola sistem yang dapat diangkat maupun dipindahkan, karena sampah berada pada bak sampah yang terbuat dari ban bekas atau tong sampah yang dapat diangkat, namun sebagian memakai sistem permanen, yaitu tempat sampah yang bersifat permanen seperti halnya bak terbuka dari pasangan batu-bata.

- Sistem pengangkutan

Sistem pengangkutan sampah pada perumahan ini adalah pengangkutan dengan sistem/pola *door to door*, yaitu diambil dari rumah ke rumah oleh petugas sampah.

- Sistem Pembuangan

Kegiatan pembuangan sementara sampah saat ini oleh warga penghuni perumahan pada TPS Gempolsari.

- Tempat Pembuangan Akhir.

Pembuangan akhir dari sampah di Perumahan dilakukan oleh DKP Pemerintah Kota Semarang dan dibuang pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang.

3.3.4 Perumahan Pedurungan Baru

3.3.4.1 Kondisi Fisik Perumahan, Lokasi dan Jumlah Hunian

Perumahan Pedurungan Baru merupakan perumahan dengan bangunan tipe 45 dan 60. Lokasi perumahan berada di jalan arteri Sukarno Hatta, Kelurahan Pedurungan Kota Semarang Jumlah hunian dalam Perumahan Pedurungan Baru adalah 101 rumah, 97 KK= 388 Jiwa.



Foto Desember 2005

**GAMBAR 3.6
TIPE HUNIAN PEDURUNGAN BARU**

3.3.4.2. Pola Pemenuhan Fasilitas Umum Persampahan

A. Penggolongan dan Karakteristik Sampah

Berdasarkan asalnya Jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat penghuni perumahan Pedurungan Baru adalah sampah dari hasil kegiatan rumah tangga. Apabila dilihat dari komposisinya jenis sampah yang dihasilkan oleh perumahan Pedurungan Baru adalah sampah yang seragam yaitu sampah dari kegiatan rumah tangga, yaitu kertas, daun,

plastik, makanan, kaleng. Hal ini menunjukkan berdasarkan bentuknya jenis sampah ini merupakan sampah yang berbentuk padatan (solid). Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya, maka sampah di Pedurungan Baru ini merupakan sampah daerah, yaitu daerah pemukiman penduduk.

Berdasarkan proses terjadinya, jenis sampah pada perumahan ini terdiri atas dua hal yaitu sampah alami dan sampah non alami. Sampah alami adalah sampah yang terjadi karena proses alami, dalam hal ini adalah rontoknya daun-daun pada pohon di perumahan ini, sedangkan sampah yang non alami disini adalah sampah yang terjadi karena kegiatan manusia, antara lain sampah sisa makanan, guntingan kertas, plastik pembungkus makanan, kaleng susu/cat, dll.

B. Produksi Sampah

Produksi sampah di Perumahan Pedurungan Baru, volume sampah yang dihasilkan sebesar $2,25 \text{ orang/hari} \times 338 \text{ orang} = 760.2 \text{ liter/hari}$

C. Komponen-komponen Dalam Pengelolaan dan Penanganan Sampah

1. ORGANISASI DAN MANAJEMEN

- Peraturan pemerintah yang membinanya

Penanganan masalah sampah pada permukiman ini dibina oleh lingkungan RT/RW. Dalam arti dikelola masyarakat perumahan melalui iuran warga yang dikoordinir lewat ketua RT setempat.

- Pola operasional yang diterapkan

Operasional yang dilakukan petugas dijadwalkan oleh pihak RT dalam seminggu mengangkut sampah 2 x pada waktu pagi hari.

- Lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani

Ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan oleh pihak perumahan, adalah pengumpulan sampah dari tong-tong sampah warga yang telah tersedia di setiap depan rumah, dan mengangkutnya menuju TPS Tlogosari Wetan.

- Sistem pembiayaan

Pembiayaan pengangkutan sampah oleh petugas pengumpul sampah di perumahan ini dari iuran warga. Petugas sampah digaji Rp. 5000 per KK.

2. TEKNIK OPERASIONAL

- Sistem Pengumpulan

Kegiatan pengumpulan sampah di perumahan Pedurungan Baru memiliki pola individual, yaitu pengumpulan sampah oleh petugas sampah dari rumah ke rumah dengan alat angkut gerobak sampah, untuk kemudian diangkut menuju ke TPS.

- Sistem Pemisahan

Pada perumahan ini tidak menganut sistem pemisahan sampah non organik dan organik. Semua sampah bercampur jadi satu tanpa dipisahkan menurut jenisnya maupun keperluannya.

- Sistem pemindahan

Sistem pemindahan sampah dari perumahan ini adalah pola sistem yang dapat diangkat maupun dipindahkan, karena sampah berada pada bak sampah yang terbuat dari ban bekas atau tong sampah yang dapat diangkat, namun sebagian memakai sistem permanen, yaitu tempat sampah yang bersifat.

- Sistem pengangkutan

Sistem pengangkutan sampah pada perumahan ini adalah pengangkutan dengan sistem/pola *door to door*, yaitu diambil dari rumah ke rumah oleh petugas sampah.

- Sistem Pembuangan

Kegiatan pembuangan sementara sampah saat ini oleh warga penghuni perumahan pada TPS Tlogosari Wetan.

- Tempat Pembuangan Akhir.

Pembuangan akhir dari sampah di Perumahan dilakukan oleh DKP Pemerintah Kota Semarang dan dibuang pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang.

3.3.5 Perumahan Graha Mutiara Semarang

3.3.5.1 Kondisi Fisik Perumahan Lokasi dan Jumlah Hunian

Perumahan Graha Mutiara Semarang merupakan perumahan dengan tipe bangunan 36, 47, 54, 56. dengan luas tanah yang bervariasi dari 90m² – 172m². Lokasi perumahan berada di jalan Tlogomukti Raya, Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Jumlah hunian dalam Perumahan Graha Mutiara Semarang berjumlah 48 unit rumah, 28 KK = 82 Jiwa.

3.3.5.2 Tingkat Pelayanan Persampahan

A. PENGGOLONGAN DAN KARAKTERISTIK SAMPAH

Berdasarkan asalnya Jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat penghuni perumahan Graha Mutiara adalah sampah dari hasil kegiatan rumah tangga. Apabila dilihat dari komposisinya jenis sampah yang dihasilkan oleh perumahan Graha Mutiara adalah sampah yang seragam yaitu sampah dari kegiatan rumah tangga, yaitu kertas, daun, plastik, makanan, kaleng. Hal ini menunjukkan berdasarkan bentuknya jenis sampah ini merupakan sampah yang berbentuk padatan (solid). Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya, maka sampah di perumahan Graha Mutiara ini merupakan sampah daerah, yaitu daerah pemukiman penduduk.

Berdasarkan proses terjadinya, jenis sampah pada perumahan ini terdiri atas dua hal yaitu sampah alami dan sampah non alami. Sampah alami adalah sampah yang terjadi

karena proses alami, dalam hal ini adalah rontoknya daun-daun pada pohon di perumahan ini, sedangkan sampah yang non alami disini adalah sampah yang terjadi karena kegiatan manusia, antara lain sampah sisa makanan, guntingan kertas, plastik pembungkus makanan, kaleng susu/cat, dll.



Foto Desember 2005

GAMBAR 3.7
TIPE HUNIAN GRAHA MUTIARA

Sumber: *Dokumentasi Pribadi, 2006*

B. PRODUKSI SAMPAH

Produksi sampah di Perumahan Graha Mutiara, volume sampah yang dihasilkan sebesar $2,25 \text{ orang/hari} \times 82 \text{ orang} = 184.5 \text{ liter/hari}$.

C. KOMPONEN-KOMPONEN DALAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH

1. ORGANISASI DAN MANAJEMEN

- Peraturan pemerintah yang membinanya

Penanganan masalah sampah pada permukiman ini dibina oleh lingkungan RT/RW. Dalam arti dikelola masyarakat perumahan melalui iuran warga yang dikoordinir lewat ketua RT setempat.

- Pola operasional yang diterapkan

Operasional yang dilakukan petugas dijadwalkan oleh pihak RT dalam seminggu mengangkut sampah tiap hari pada waktu pagi hari.

- Lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani

Ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan oleh pihak perumahan, adalah pengumpulan sampah dari tong-tong sampah warga yang telah tersedia di setiap depan rumah, dan mengangkutnya menuju TPS yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang sesuai

- Sistem pembiayaan

Pembiayaan pengangkutan sampah oleh petugas pengumpul sampah di perumahan Gria Arteri sari dari iuran warga. Petugas sampah digaji Rp. 7500 per KK.

3. TEKNIK OPERASIONAL

- Sistem Pengumpulan

Kegiatan pengumpulan sampah di perumahan Graha Mutiara Semarang memiliki pola individual, yaitu pengumpulan sampah oleh petugas sampah dari rumah ke rumah dengan alat angkut gerobak sampah, untuk kemudian diangkut menuju ke TPS.

- Sistem Pemisahan

Pada perumahan ini tidak menganut sistem pemisahan sampah non organik dan organik. Semua sampah bercampur jadi satu tanpa dipisahkan menurut jenisnya maupun keperluannya.

- Sistem pemindahan

Sisten pemindahan sampah dari perumahan ini adalah pola sistem yang dapat diangkat maupun dipindahkan, karena sampah berada pada bak sampah yang terbuat dari ban bekas atau tong sampah yang dapat diangkat, namun sebgaiian memakai sistem permanen, yaitu tempat sampah yang bersifat permanen seperti halnya bak terbuka dari pasangan batu-bata.

- Sistem pengangkutan

Sistem pengangkutan sampah pada perumahan ini adalah pengangkutan dengan sistem/pola door to door, yaitu diambil dari rumah ke rumah oleh petugas sampah.

- Sistem Pembuangan

Kegiatan pembuangan sementara sampah saat ini oleh warga penghuni perumahan pada TPS Tlogosari Wetan.

- Tempat Pembuangan Akhir.

Pembuangan akhir dari sampah di Perumahan dilakukan oleh DKP Pemerintah Kota Semarang dan dibuang pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang.

3.3.6 Perumahan Pondok Indah Semarang

3.3.6.1 Kondisi Fisik Perumahan, Lokasi dan Jumlah Hunian

Perumahan Pondok Indah Semarang merupakan perumahan dengan tipe bangunan 36, 47, 54, 70 dengan luas tanah yang bervariasi dari 90m² –200m². Lokasi perumahan berada di Jalan Arteri Sukarno Hatta, Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Jumlah hunian dalam Perumahan Pondok Indah Semarang berjumlah 86 unit rumah, dengan 74 KK = 242 Jiwa.

3.3.6.2 Tingkat Pelayanan Persampahan

Berdasarkan asalnya Jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat penghuni perumahan Pondok Indah adalah sampah dari hasil kegiatan rumah tangga. Apabila dilihat dari komposisinya jenis sampah yang dihasilkan oleh perumahan Pondok Indah adalah sampah yang seragam yaitu sampah dari kegiatan rumah tangga, yaitu kertas, daun, plastik, makanan, kaleng. Hal ini menunjukkan berdasarkan bentuknya jenis sampah ini merupakan sampah yang berbentuk padatan (solid). Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya, maka sampah di perumahan Pondok Indah merupakan sampah daerah, yaitu daerah pemukiman penduduk. Berdasarkan proses terjadinya, jenis sampah pada

perumahan ini terdiri atas dua hal yaitu sampah alami dan sampah non alami. Sampah alami adalah sampah yang terjadi karena proses alami, dalam hal ini adalah rontoknya daun-daun pada pohon di perumahan ini, sedangkan sampah yang non alami disini adalah sampah yang terjadi karena kegiatan manusia, antara lain sampah sisa makanan, guntingan kertas, plastik pembungkus makanan, kaleng susu/cat, dll.



Foto Desember 2005

**GAMBAR 3.8
TIPE HUNIAN PONDOK INDAH**

B. Produksi Sampah

Produksi sampah di Perumahan Pondok Indah Semarang, volume sampah yang dihasilkan sebesar $2,25 \text{ orang/hari} \times 242 \text{ orang} = 544.5 \text{ liter/hari}$.

C. Komponen-komponen Dalam Pengelolaan dan Penanganan Sampah

1. ORGANISASI DAN MANAJEMEN

- Peraturan pemerintah yang membinanya

Penanganan masalah sampah pada permukiman ini dibina oleh lingkungan RT/RW. Dalam arti dikelola masyarakat perumahan melalui iuran warga yang dikordinir lewat ketua RT setempat.

- Pola operasional yang diterapkan

Operasional yang dilakukan petugas dijadwalkan oleh pihak RT dalam seminggu mengangkut sampah 2 x (kali) pada waktu pagi hari.

- Lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani

Ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan oleh pihak perumahan, adalah pengumpulan sampah dari tong-tong sampah warga yang telah tersedia di setiap depan rumah, dan mengangkutnya menuju TPS yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang sesuai dengan lokasi perumahan.

2. TEKNIK OPERASIONAL

- Pewadahan

Penyediaan pewadahan untuk kawasan pemukiman disediakan sendiri di setiap rumah tangga masing-masing. Sedangkan Pewadahan untuk sampah sapun jalan bersifat swakelola.

- Sistem Pengumpulan

Kegiatan pengumpulan sampah di perumahan Pondok Indah Semarang memiliki pola individual, yaitu pengumpulan sampah oleh petugas sampah dari rumah ke rumah dengan alat angkut gerobak sampah, untuk kemudian diangkut menuju ke TPS.

- Sistem Pemisahan

Pada perumahan ini tidak menganut sistem pemisahan sampah non organik dan organik. Semua sampah bercampur jadi satu tanpa dipisahkan menurut jenisnya maupun keperluannya.

- Sistem pemindahan

Sisten pemindahan sampah dari perumahan ini adalah pola sistem yang dapat diangkat maupun dipindahkan, karena sampah berada pada bak sampah yang terbuat dari ban bekas atau tong sampah yang dapat diangkat, bukan dari tempat sampah yang bersifat permanen seperti halnya bak terbuka dari pasangan batu-bata.

- Sistem pengangkutan

Sistem pengangkutan sampah pada perumahan ini adalah pengangkutan dengan sistem/pola door to door, yaitu diambil dari rumah ke rumah oleh petugas sampah.

- Sistem Pembuangan

Kegiatan pembuangan sementara sampah saat ini oleh warga penghuni Pondok Indah Semarang pada TPS Tlogosari Wetan.

- Tempat Pembuangan Akhir.

Pembuangan akhir dari sampah di Perumahan Pondok Indah Semarang dilakukan oleh DKP Pemerintah Kota Semarang dan dibuang pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang.

BAB IV
ANALISIS UPAYA PEMENUHAN FASILITAS PERSAMPAHAN
KAWASAN PERUMAHAN DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA
SEMARANG

4.1 Analisis Kondisi Fisik Perumahan

Kondisi Fisik perumahan yang menjadi obyek penelitian yaitu perumahan Griya Arteri Sari, Medoho Indah, Gria Medoho Asri, Pedurungan Baru, Graha Mutiara Semarang, Perumahan Pondok Indah, secara garis besar dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut ini:

TABEL IV.1
KONDISI FISIK PERUMAHAN DI KECAMATAN PEDURUNGAN

Perumahan	Jumlah Rumah (Unit)	Tipe Rumah	Harga Jual Rumah (juta)	Kondisi/Sistem Lingkungan Perumahan
Gria Arteri Sari	70	45/103 dan 60/126	140 juta- 200 juta	Cluster 1 Pintu
Medoho Indah	90	36 dan 45	<150 Juta	Non Cluster
Gria Medoho Asri	45	45/103 dan 60/126	175 juta-250juta	Cluster 1 Pintu
Pedurungan Baru	101	36, 45, 60	150 juta- 250 juta	Cluster 1 Pintu
Graha Mutiara	48	36, 47, 54, 56/ luas tanah 90m2 – 172m2	175 juta – 400 juta	Semi Cluster
Pondok Indah	86	36, 47, 54, 70 dengan luas tanah yang bervariasi dari 90m2 –200m2	150 juta – 250 juta	Non Cluster

Sumber: Analisis, 2006

Kondisi fisik perumahan di Kecamatan Pedurungan ini mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat yang menghuni perumahan tersebut. Hal ini juga akan mempengaruhi perilaku masyarakat setempat, terutama mengenai masalah pengangan fasilitas persampahan. Bentuk perumahan dan harga rumah menentukan karakter penghuni perumahan. Hunian yang sifatnya masih baru disini adalah Graha Mutiara Semarang, Gria

medoho Asri dan Gria arteri sari, selain itu penghuni yang mayoritas WNI Keturunan dengan tingkat perekonomian dan tingkat pendidikan tinggi menjadikan menjadikan pola penanganan masalah sampah di wilayah tersebut hampir tidak ada masalah, baik dalam pewadahan, pengangkutan sampah, maupun aspek pembiayaan dan pengelolaannya.

4.2 Analisis Fasilitas Persampahan

4.2.1. Analisis Pelayanan Persampahan di Kecamatan Pedurungan.

Aspek-aspek pelayanan persampahan yang akan dianalisis pada pembahasan berikut meliputi Pengelolaan sampah lingkungan, teknis operasional, pembiayaan, pengaturan dan peran serta masyarakat. Aspek organisasi dan manajemen pelayanan persampahan di Kecamatan Pedurungan saat ini berada di bawah tugas dan tanggungjawab Dinas Kebersihan Kota Semarang, di dalam pelaksanaannya dibantu oleh seksi penanggulangan Kebersihan di lingkup organisasi Kecamatan Pedurungan.

Institusi ini sudah cukup untuk untuk Kecamatan Pedurungan. Dilihat dari beban pengelolaan sampah yang cenderung semakin besar dengan tumbuhnya permukiman/perumahan baru di Kecamatan Pedurungan maka institusi yang ada perlu dikembangkan untuk menangani pengelolaan sampah.

4.2.1.1 Teknik Operasional

Tahap-tahap pola pengelolaan persampahan tersebut antara lain:

f. Sistem Pewadahan

Berdasarkan pengamatan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, jenis wadah yang digunakan untuk menampung sampah pada sumbernya sangat bervariasi. Jenis pewadahan tersebut berupa:

- Bin/tong drum,
- Ban bekas,
- Bin dari plastik,

- Keranjang bambu/kotak kayu,
- Kotak permanen dari pasangan batu bata yang dipilester.

Berdasarkan jenis pewadahan tersebut, maka masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan dalam menampung sampah dari sumbernya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.2 di bawah ini:

TABEL IV.2
ANALISIS TERHADAP JENIS WADAH SAMPAH

No	Jenis Wadah	Spesifikasi Wadah		
		Kapasitas (liter)	Kelebihan	Kekurangan
1	Bin/tong drump	30-50	<ul style="list-style-type: none"> - Harga relatif murah - Dapat dipindahkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan mudah berkarat - Kurang praktis - Gangguan binatang
2	Ban Bekas	30	<ul style="list-style-type: none"> - Mudah dalam operasional, - Harga relatif murah, - Daya tampung kecil 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang baik untuk sampah basah - Perlu perawatan/cat - Berat - Usia pemakaian sebentar.
3	Bin dari Plastik	40	<ul style="list-style-type: none"> - Sehat - Terhindar dari gangguan binatang 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan mudah terbakar - Kurang praktis
4	Kotak Permanen	50	<ul style="list-style-type: none"> - Praktis, kuat dan tahan lama, - Estetika bagus - Terhindar dari gangguan binatang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan mahal

Sumber: Hasil Analisis, 2006.

g. Sistem Pengumpulan

Sistem pengumpulan sampah yang ada pada wilayah studi memiliki pola pengumpulan antara lain:

- Pola individual, yaitu pengumpulan sampah dari rumah ke rumah dengan alat angkut jarak pendek atau gerobak sampah dengan layanan *door to door* untuk diangkut ke tempat penampungan sementara. Dalam hal ini pelayanannya dilakukan secara swakelola atau swastanisasi.
- Pola Komunal, yaitu pengumpulan sampah dari beberapa rumah dilakukan pada satu titik pengumpulan langsung oleh penghasil sampah, untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan. Dalam hal ini dari TPS yang ada di Tlogosari dan Pedurungan menuju TPA Jatibarang Kota Semarang.

h. Sistem Pemisahan

Berdasarkan program dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang, sistem ini bertujuan untuk memisahkan jenis-jenis sampah, yaitu sampah organik dipisahkan dari sampah non organik (gelas, logam, plastik, keramik), kemudian sampah-sampah tersebut dipisahkan lagi berdasarkan jenisnya menurut keperluan, agar mempermudah dalam pengolahan dan pembuangannya. Tetapi pada kenyataannya sistem ini belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan beberapa faktor, antara lain besarnya pembiayaan yang harus disiapkan, infrastruktur, teknologi dan kesiapan SDM.

i. Sistem Pemindahan

Sistem ini menerima sampah yang berasal dari sumber, untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir yang memiliki pola-pola sebagai berikut, yaitu:

- Pola sistem permanen, seperti bak penampungan sampah yang berfungsi sebagai TPS sementara.
- Pola sistem yang dapat diangkat dan dipindahkan, seperti *transfer depo* yang ada di wilayah Tlogosari dan Pedurungan.

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan sistem ini memiliki sisi kelebihan yaitu:

- Sebagai peredam tingkat ketergantungan *fase* pengumpulan dengan *fase* pengangkutan,
- Sebagai pos pengendalian tingkat kebersihan wilayah yang bersangkutan,

j. Sistem Pengangkutan

Sistem pengangkutan yang ada di wilayah pengamatan memiliki 3 jenis, yaitu:

- Pengangkutan dari satu lokasi pemindahan ke tempat pembuangan akhir
- Pengangkutan dari kelompok pemindahan menuju ke tempat pembuangan akhir
- Pengangkutan dengan pola *door to door*.

Selanjutnya fasilitas persampahan yang melayani kawasan di Kecamatan Pedurungan, terbagi atas tiga wilayah kerja, yaitu; Kecamatan Pedurungan Kidul, Pedurungan Lor, dan Pedurungan Tengah. Fasilitas persampahan yang ada berupa kontainer, *transfer depo*, dan bak sampah. Di Kecamatan Pedurungan Kidul ada 2 buah *container* dan 1 *depo* yang lokasinya berada di Perumahan Korpri dan 1 kontainer di wilayah Plamongan Hijau. Sedangkan di Kecamatan Pedurungan Lor ada 2 kontainer saja

tanpa ada depo yang letaknya di daerah Ketapang. Untuk Kecamatan Pedurungan Tengah memiliki 2 kontainer dan 1 *transfer depo* yang terletak di Kekancan Mukti dan 1 bak sampah yang letaknya berada pada Pasar Pedurungan.

4.2.1.2 Pembiayaan

Aspek pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar roda sistem pengelolaan persampahan dapat bergerak dengan lancar. Diharapkan bahwa sistem pengelolaan persampahan akan menuju pada pembiayaan sendiri, termasuk di sini pembentukan perusahaan daerah atau swasta. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sektor pembiayaan ini menyangkut beberapa aspek seperti:

- Proporsi APBN dan anggaran pengelolaan persampahan, antara retribusi dan biaya pengelolaan persampahan,
- Proporsi komponen biaya tersebut untuk gaji, transportasi, pemeliharaan, pendidikan dan pengembangan serta administrasi,
- Proporsi antara retribusi dengan pendapatan masyarakat,
- Struktur dan penarikan retribusi yang berlaku.

Pembiayaan dalam pengelolaan dan penanganan sampah di Kawasan Perumahan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang ditangani Dinas Kebersihan yang selanjutnya diserahkan ke unit kerja yang ada di Kecamatan Pedurungan. Dengan demikian kondisi ini masih mengandalkan dari subsidi pemerintah, sehingga tidak dapat mandiri dan selalu bergantung kepada pemerintah. Selain itu, dinas ini bersifat nirlaba, sehingga kinerja yang dilakukan relatif stagnan dari tahun ke tahun. Berbeda dengan perusahaan daerah kebersihan atau perusahaan swasta yang mengandalkan pada retribusi untuk pendanaannya dan tidak lagi mendapat subsidi pemerintah, sehingga dapat mengurangi beban anggaran belanja pemerintah. Selain itu, motif perusahaan adalah untuk mencari keuntungan sehingga perusahaan tersebut mempunyai potensi berkembang lebih besar yang disertai dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, aspek pembiayaan pada

Dinas Kebersihan Kota Semarang dalam pengelolaan persampahan sampai saat ini berasal dari beberapa sumber, antara lain (*Dinas Kebersihan, 2004*).

Sedangkan besarnya retribusi kebersihan untuk masing-masing wajib retribusi ditetapkan berdasarkan:

- Sifat bangunan persil,
- Kelas Jalan,
- Besarnya volume sampah,
- Jenis Pasar.

Berdasarkan peraturan yang ada di Dinas Kebersihan Kota Semarang, besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a) Persil Bukan Niaga

- Persil yang bersifat rumah tangga yang terletak di jalan kelas I dan II: Rp 5.000,00/bulan.
- Persil yang bersifat rumah tangga yang terletak di jalan kelas III dan IV: Rp 3.000,00/bulan.
- Persil yang bersifat rumah tangga yang terletak di jalan lingkungan: Rp 1.000,00/bulan.

a) Persil bersifat niaga

- Persil bersifat niaga yang terletak di jalan kelas I dan II: Rp 6.000,00/m³
- Persil bersifat niaga yang terletak di jalan kelas III dan IV: Rp 4.000,00/m³

a) Lingkungan pasar

- Kios/vak: Rp 150,00/hari
- Los/dasaran terbuka: Rp 100,00/hari.

a) Badan sosial/tempat ibadah

- Badan sosial/tempat ibadah Rp 1.000,00/bulan

Adapun bagi mereka yang membuang langsung sampahnya ke TPA dikenakan retribusi Rp 2.500,00/m³ (*Dinas Kebersihan Kota Semarang, 2004*). Maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi persampahan merupakan bentuk konkret partisipasi masyarakat dalam membiayai program pengelolaan persampahan. Bentuk penarikan dapat dibenarkan bila pelaksanaannya adalah badan formal yang diberi kewenangan oleh pemerintah.

4.2.1.3. Pengaturan

Aspek pengaturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Berikut adalah dua kebijakan yang saat ini erat kaitannya dengan peran serta swasta dalam pembangunan prasarana, yaitu:

a) Keppres No.7 Tahun 1998

Memuat prinsip-prinsip transparansi dan kompetisi untuk penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur. Perhatian terhadap demokratisasi. Perhatian terhadap demokratisasi, efisiensi, dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya alam sangat diperhatikan dalam peraturan tersebut, sehingga diharapkan saling menguntungkan pihak-pihak: pemerintah, swasta, masyarakat.

b) UU No. 32 Tahun 2004

Pasal-pasal yang berkaitan dengan pekerjaan umum (prasarana) antara lain pada Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah kota berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan melaksanakan bidang-bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pertanian, perhubungan, dan lain-lain dengan sebaik baiknya.

4.2.2. Analisis Pelayanan Persampahan di Kawasan Perumahan Kecamatan Pedurungan.

Pengelolaan sampah yang ada di wilayah studi dapat dilihat dari perkembangan masing-masing perumahan, dari awal tahun pembangunan sampai dengan saat sekarang

ini. Dari data tersebut maka peneliti dapat mengetahui awal pengelolaan pelayanan sampah yang ada di masing-masing perumahan yang dijadikan obyek penelitian.

Pengelolaan sampah di Perumahan Gria Arteri Sari dimulai pada bulan September tahun 2004, berdasarkan tahun awal operasional perumahan tersebut. Pengelolaan sampah di Perumahan Medoho Indah dimulai pada tahun 1999, sedangkan tahun awal operasional perumahan tersebut pada tahun 1997. Pengelolaan sampah di Perumahan Gria Medoho Asri, dimulai pada bulan Agustus tahun 2004, sedangkan tahun awal operasional perumahan tersebut pada bulan februari tahun 2004.

Pengelolaan sampah di Perumahan Pedurungan Baru, dimulai pada tahun 2001, berdasarkan tahun awal operasional perumahan tersebut. Pengelolaan sampah di Perumahan Graha Mutiara, dimulai pada bulan Desember tahun 2005, sedangkan operasional perumahan tersebut pada bulan Agustus tahun 2005. Sedangkan untuk pengelolaan sampah di Perumahan Pondok Indah Semarang, dimulai pada Maret tahun 2001, sedangkan tahun operasional perumahan tersebut pada bulan januari tahun 2001.

4.2.2.1. Analisis Penggolongan dan Karakteristik Sampah

Berdasarkan asalnya Jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat penghuni perumahan di kawasan pedurungan sebagian besar dari hasil kegiatan rumah tangga. yaitu kertas, daun, plastik, makanan, kaleng. Bentuk sampah ini merupakan sampah yang berbentuk padatan (*solid*). Dengan karakteristik sampah tersebut maka sistem pembuangannya tidak terlalu sulit, karena bukan sampah yang berasal dari limbah atau usaha/produksi perusahaan. Sehingga tidak memerlukan kekhususan dalam penanganannya atau pengolahannya. Hanya saja dengan jenis sampah rumah tangga seperti ini ada baiknya jika masyarakat memili kesadaran dengan memisahkan mana sampah yang organik dan mana yang non organik agar lebih mudah penghancurannya pada TPA.

Pembedaan pembuangan sampah sesuai karakternya ini, terkadang juga tidak ada gunanya jika petugas pembuang sampah/pengumpul sampah mengangkut sampah menjadi satu dalam satu gerobak/tanpa pemisahan tempat. Jadi kesadaran pemisahan sesuai karakter sampah perlu dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pemilik rumah maupun petugas untuk kemudahan penghancuran pada TPA.

4.2.2.2. Analisis Produksi Sampah

Produksi sampah di Perumahan Gria Arteri sari dalam hal ini volume sampah sebesar $2,25 \text{ orang/hari} \times 130 \text{ orang} = 292.5 \text{ liter/hari}$. Produksi sampah di Perumahan Medoho Indah volume sampah yang dihasilkan sebesar $2,25 \text{ orang/hari} \times 210 \text{ orang} = 472.5 \text{ liter/hari}$. Produksi sampah di Perumahan Gria Medoho Asri, volume sampah yang dihasilkan sebesar $2,25 \text{ orang/hari} \times 132 \text{ orang} = 297 \text{ liter/hari}$. Produksi sampah di Perumahan Pedurungan Baru, volume sampah yang dihasilkan sebesar $2,25 \text{ orang/hari} \times 338 \text{ orang} = 760.2 \text{ liter/hari}$. Produksi sampah di Perumahan Graha Mutiara, volume sampah yang dihasilkan sebesar $2,25 \text{ orang/hari} \times 82 \text{ orang} = 184.5 \text{ liter/hari}$. Produksi sampah di Perumahan Pondok Indah Semarang, volume sampah yang dihasilkan sebesar $2,25 \text{ orang/hari} \times 242 \text{ orang} = 544.5 \text{ liter/hari}$.

Untuk lebih jelasnya produksi sampah di tiap perumahan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV.3

**TABEL PRODUKSI SAMPAH PERUMAHAN
DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG**

Perumahan	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah KK	Produksi Sampah (liter/hari)
Gria Arteri sari	70	30 KK /130 Jiwa	292.5
Medoho Indah	90	75 KK/ 210 Jiwa	472.5
Gria Medoho Asri	45	30KK/ 132 Jiwa	297
Pedurungan Baru	101	97 KK/ 388 Jiwa	760.2
Graha Mutiara Semarang	48	28 KK/ 82 Jiwa	184.5

Pondok Indah Semarang	86	74 KK/ 242 Jiwa	544.5
Total			2.541,9

Sumber: Analisis, 2006

Berdasarkan pengukuran dan observasi dilapangan. Bahwa produksi sampah terangkut semua ke TPS, hal ini terlihat dengan tidak adanya penimbunan sampah pada permukiman tersebut.

4.2.2.3. Analisis Komponen-komponen Dalam Pengelolaan dan Penanganan Sampah

Analisis komponen dalam pengelolaan dan penanganan persampahan yang ada di wilayah studi sebagai obyek penelitian bertujuan untuk mengetahui apa yang dilakukan warga dalam upaya pengelolaan dan penanganan persampahan tersebut. Jadi dari analisis ini diharapkan dapat diketahui reaksi (action) dari masing-masing warga penghuni perumahan-perumahan tersebut.

a. Sistem Pewadahan

Penyediaan pewadahan untuk kawasan pemukiman disediakan sendiri di setiap rumah tangga masing-masing. Sedangkan Pewadahan untuk sampah sapun jalan bersifat swakelola. Jenis Wadah sampah yang digunakan ada yang bersifat permanen maupun dari bahan yang bisa diangkat seperti tong atau dari ban bekas.

Secara garis besar jenis wadah yang digunakan pada perumahan di Kecamatan pedurungan yang menjadi obyek penelitian ini memiliki kesamaan bentuk. Jenis wadah sampah tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:



Foto Desember 2005

GAMBAR 4.1
JENIS WADAH SAMPAH DI KAWASAN PERUMAHAN
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Berdasarkan berbagai jenis pewadahan yang ada di atas, untuk masing-masing kondisi yang ada pada Kawasan Perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.4
ANALISIS TERHADAP KONDISI WADAH SAMPAH
PADA KAWASAN PERUMAHAN DI KECAMATAN PEDURUNGAN

No	Nama Perumahan	Kondisi Pewadahan			
		Jml Rumah	Jml Pewadahan	%	Kondisi Umum
1	Pedurungan Baru	101	89	88	Kurang baik
2	Pondok Indah	86	61	71	Kurang baik
3	Medoho Indah	90	59	52	Kurang baik
4	Gria Medoho Asri	45	22	49	Baik
5	Gria Arteri Sari	70	37	53	Baik
6	Graha Mutiara	48	21	44	Baik

Sumber: Hasil Analisis

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk perumahan Pedurungan Baru, Pondok Indah dan Medoho Indah yang merupakan perumahan yang dibangun sudah cukup lama, jumlah wadah sampah yang ada relatif banyak tetapi kondisi fisiknya kurang baik. Hal ini disebabkan karena faktor umur dan kurangnya perawatan. Sedangkan untuk Perumahan Gria Medoho Asri, Gria Arteri Asri serta Graha Mutiara yang merupakan perumahan baru, jumlah wadah sampah yang ada relatif sedikit dimungkinkan karena penghuni yang ada belum banyak. Kondisi fisik wadah sampah juga masih baik.



FOTO DESEMBER 2005

GAMBAR 4.2
LAHAN KOSONG DI PERUMAHAN MEDOHO INDAH
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT MEMBUANG SAMPAH DAN
MEMBAKAR SAMPAH.

Namun di sisi lain, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, yaitu masih ada warga yang rumahnya tidak memiliki wadah sampah, hal ini terlihat pada perumahan Medoho Indah. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

- Kurangnya kesadaran warga akan pentingnya pewadahan sampah, karena sampah yang terbuka dan terkena air hujan akan membusuk dan menimbulkan penyakit karena polusi udara dan lingkungan.
- Tidak menyetujui akan iuran yang telah menjadi kesepakatan bersama, karena dinilai terlalu besar dan memberatkan. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa perumahan di

Medoho Indah kebanyakan merupakan perumahan dengan kondisi sosial masyarakat menengah ke bawah, yang masih memperhitungkan nilai/biaya yang dikeluarkan setiap kegiatan.

Akibatnya karena ada lahan kosong di lokasi perumahan Medoho Indah tersebut, ada warga yang masih membuang dan membakar sampahnya, karena dinilai jauh lebih cepat dan ekonomis. Namun tentunya hal ini memicu pro dan kontra dari masyarakat setempat, selain menimbulkan pencemaran udara, juga keberatan dari pihak pemilik tanah karena lahannya digunakan untuk pembakaran sampah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di lingkungan perumahan medoho Indah kurang baik karena kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat setempat.



FOTO DESEMBER 2005

GAMBAR 4.3
LAHAN KOSONG YANG DIJADIKAN TEMPAT
PEMBUANGAN SAMPAH
DI KAWASAN PERUMAHAN MEDOHO INDAH



FOTO DESEMBER 2005

GAMBAR 4.4
RUMAH YANG TIDAK MEMILIKI WADAH SAMPAH



Foto Desember 2005

GAMBAR 4.5
GEROBAK SAMPAH SEBAGAI MEDIA PENGUMPULAN SAMPAH
UNTUK DIBUANG KE LOKASI TPS

b. Sistem Pemisahan

Berdasarkan program dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang, sistem ini bertujuan untuk memisahkan jenis-jenis sampah, yaitu sampah organik dipisahkan dari sampah non organik (gelas, logam, plastik, keramik), kemudian sampah-sampah tersebut dipisahkan lagi berdasarkan jenisnya menurut keperluan, agar

mempermudah dalam pengolahan dan pembuangannya. Tetapi pada kenyataannya sistem ini belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan beberapa faktor, antara lain pembiayaan dan SDM.

Pada perumahan di Kecamatan Pedurungan, ada beberapa warga yang sudah memisahkan jenis sampah. Hal ini dilakukan dengan membungkus sampah pada tiap plastik yang berbeda. Pembedaan dilakukan dengan melihat karakteristik sampah organik (sampah yang bisa dibakar/ditimbun dalam tanah/mudah dihancurkan) dan sampah *non organik* (sampah yang sulit dihancurkan: seperti kaleng, gelas, plastik, serta jenis sampah lainnya).



Foto Desember 2005

GAMBAR 4. 6 UPAYA PEMISAHAN JENIS SAMPAH

Pemisahan sampah ini baru dilakukan oleh sebagian warga di perumahan-perumahan baru, yaitu perumahan Graha Mutiara Semarang, dan Perumahan Gria Arteri Sari serta perumahan Gria Medoho Asri. Dari pengamatan di lapangan hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

- Kultur masyarakat yang tinggal di tiga perumahan tersebut didominasi oleh warga negara Indonesia keturunan (Tionghoa), yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke atas/ diatas rata-rata.
- Kondisi fisik dan lingkungan yang bersifat cluster 1 Pintu, dengan harga rumah antara Rp.175 juta–400 juta, menjadikan system pengelolaan sampah lebih terorganisir dan teratur.

c. Sistem Pemindehan

Sistem ini menerima sampah yang berasal dari sumber, untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir yang memiliki pola-pola sebagai berikut, yaitu:

- Pola sistem permanen, seperti bak penampungan sampah yang berfungsi sebagai TPS sementara.
- Pola sistem yang dapat diangkat dan dipindahkan, seperti *transfer* depo yang ada di wilayah Tlogosari dan Pedurungan.

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan sistem ini memiliki sisi kelebihan yaitu:

- Sebagai peredam tingkat ketergantungan *fase* pengumpulan dengan *fase* pengangkutan,
- Sebagai pos pengendalian tingkat kebersihan wilayah yang bersangkutan.



Foto Januari 2006

GAMBAR 4.7
CONTOH KONDISI TPS DI KAWASAN PERUMAHAN
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Dari gambar 4.7 terlihat bagaimana kondisi TPS Pedurungan yang terlihat terbuka, berserakan dan tidak tertutup. Hal ini merupakan indikasi bahwa pembuatan TPS di Kecamatan Pedurungan kurang terawat dan cenderung hanya menyediakan tempat pembuangan sampah, tanpa memperhatikan bentuk dan fungsinya. Selain itu, kondisi TPS seperti ini membahayakan kesehatan lingkungan dan manusia disekitar TPS tersebut. Untuk proses pemindahan menggunakan transfer depo (120m³), yang berada di wilayah administrasi Kelurahan Tlogosari Kulon dan Pedurungan.

d. Sistem Pengangkutan.

Sistem pengangkutan yang ada di wilayah pengamatan memiliki 3 jenis, yaitu:

- Pengangkutan dari satu lokasi pemindahan ke tempat pembuangan akhir,
- Pengangkutan dari kelompok pemindahan menuju ke tempat pembuangan akhir,
- Pengangkutan dengan pola *door to door* (dari rumah ke rumah)

Pengangkutan sampah pada perumahan yang menjadi wilayah penelitian menggunakan gerobak sampah terbuka. Penggunaan gerobak terbuka ini memiliki kelemahan, antara lain adalah sampah mudah terbang saat diangkut menuju TPS (tercecer di jalan), selain itu juga kapasitas angkut yang terbatas, sehingga ada beberapa sampah dari warga perumahan tidak terangkut untuk hari itu, akibatnya sampah menjadi menumpuk di jalan depan rumah.

Selanjutnya proses pengangkutan menggunakan Dump Truck kapasitas 8m³, yang diambil dari lokasi transfer depo. Sampah hasil pengangkutan tersebut akan dibawa menuju TPA Sampah di Jatibarang Kota Semarang.



Foto Januari 2006

**GAMBAR 4.8
CONTOH GEROBAK PENGANGKUT SAMPAH
DI KAWASAN PERUMAHAN**

4.2.3. Analisis Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan pada Kawasan Perumahan di Kecamatan Pedurungan.

Upaya-upaya pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan persampahan bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang berperan dalam upaya pengelolaan tersebut.

Adapun upaya yang dimaksudkan berorientasi untuk melakukan:

- Pengurangan timbulan sampah dari sumbernya.
- Pengelolaan persampahan, yang secara garis besar terdiri atas pengangkutan ke tempat pembuangan dan proses pengolahannya.

Hal penting yang harus diingat adalah pengelolaan persampahan seharusnya tidak lagi bertujuan “*membuang*” atau “*memusnahkan*” karena hal tersebut hanya menimbulkan biaya tanpa ada nilai tambah. Apa yang menjadi peran serta masyarakat penghuni perumahan dalam hal ini yang telah dilakukan adalah:

- Melaksanakan gerakan kebersihan secara rutin.
- Membayar dana kebersihan/ retribusi

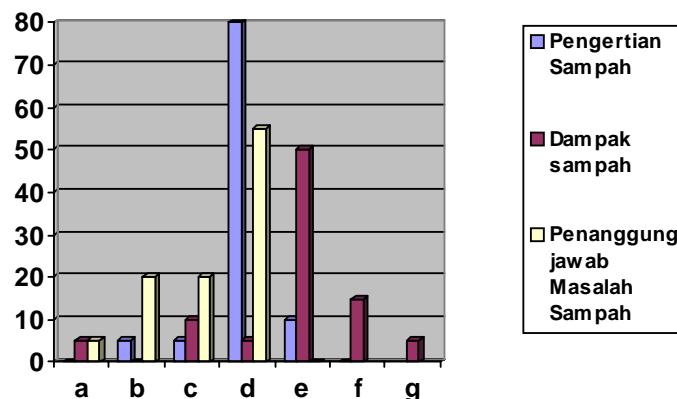
- Ikut berperan aktif dalam kegiatan yang diadakan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.
- Membuang sampah pada tempatnya.

4.2.3.1. Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah

Analisis persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah bertujuan untuk mengetahui mengapa masyarakat sebagai penghuni perumahan memerlukan penanganan dan pengelolaan pelayanan persampahan di ruang lingkup wilayah studi yang menjadi obyek penelitian.

a. Persepsi Masyarakat tentang Sampah

Masalah tentang sampah dan kebersihan tidak hanya menjadi tugas para petugas kebersihan, namun juga menjadi tanggungjawab bagi masyarakat pada umumnya. Pemahaman akan masalah sampah pada masyarakat penghuni perumahan yang menjadi obyek penelitian secara garis besar pola pemahaman mereka cukup baik. Hal ini terlihat dari hasil kuisisioner terhadap masyarakat mengenai pemahaman sampah oleh penghuni perumahan pada gambar 4.9 berikut ini.



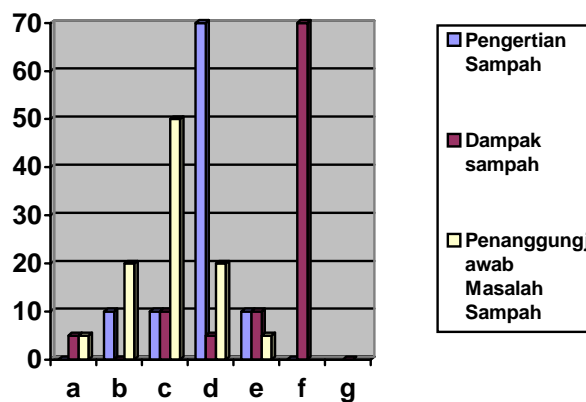
Sumber: Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 4.9
DIAGRAM PERSEPSI PENGHUNI PERUMAHAN

TENTANG SAMPAH PADA KAWASAN PERMUKIMAN

Dari hasil kusioner, diketahui bahwa pengertian sampah oleh penghuni perumahan sangat baik, hal ini terlihat dari jumlah jawaban yang 80% menjawab pilihan (d) Barang bekas yang dibuang ditempat yang telah ditentukan. Sedangkan untuk dampak sampah juga diketahui bahwa 50% responden menjawab (e) Tempat berkembangnya bibit penyakit, 30% menjawab (f) mengganggu kesehatan.

Jadi mayoritas penghuni sudah mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh sampah. Untuk masalah penanggungjawab masalah sampah, persepsi penghuni rumah didominasi pendapat Kepala Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah (d) hingga 70 % responden. Pendapat petugas pengumpul sampah/kebersihan agak sedikit berbeda dari prosentase yang dihasilkan dari setiap permasalahan. Pengertian sampah 70 % petugas tahu dengan benar, dampak sampah 70 % petugas menjawab lebih sederhana, yaitu mengganggu kesehatan (f). Dan untuk penanggungjawab masalah sampah petugas cenderung menjawab menjadi tanggungjawab pemerintah (c).



GAMBAR 4.10
DIAGRAM PERSEPSI PETUGAS KEBERSIHAN TENTANG SAMPAH

PADA KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN PEDURUNGAN

Sumber: Hasil Analisis, 2005

TABEL IV.5

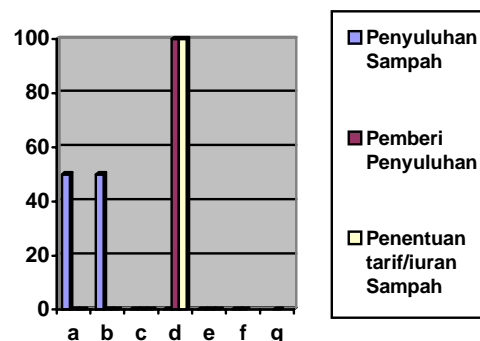
PERSEPSI DAN PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG SAMPAH PADA KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN PEDURUNGAN.

No	Masyarakat	Pemahaman Tentang Sampah	
		Baik	Kurang Baik
1	Penghuni Perumahan	90 %	10%
2	Petugas Kebersihan	70%	30%

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Berdasarkan tabel tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat tentang sampah sudah sangat baik berkisar antara 60– 90%. Hal ini terlihat dengan tidak adanya sampah yang menumpuk dan terbuang tidak pada tempatnya di lokasi perumahan, meskipun tidak terkoordinir oleh pihak pengembang, namun kesadaran akan kebersihan menjadikan pentingnya mereka memikirkan masalah pembuangan sampah yang mereka hasilkan sendiri. Hal yang muncul disini adalah kesadaran merencanakan program kebersihan dan membayar para petugas/pengumpul sampah untuk mengambil sampah dari permukiman mereka ke Tempat pembuanagn Sampah Sementara (TPS) terdekat.

b. Persepsi Masyarakat tentang Penanganan Sampah



GAMBAR 4.11

DIAGRAM PERSEPSI DAN PANDANGAN PENGHUNI PERUMAHAN TENTANG PENANGANAN SAMPAH

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Melihat gambar 4.11 di atas diketahui bahwa warga perumahan 50% merasa sudah mendapat penyuluhan tentang sampah dan 50% belum mendapat penyuluhan. Alasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah karena mereka yang 50% tidak aktif dalam kegiatan di lingkungan perumahan mereka, atau cenderung bersifat individualis. Sedangkan yang 50 % pernah mendapat penyuluhan dari aparat RT/RW di perumahan mereka.

c. Persepsi Masyarakat tentang Optimalisasi Pekerjaan Pengumpul Sampah.

Dalam kegiatan pengumpulan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh para petugas kebersihan Kecamatan Pedurungan, sampai saat ini dirasakan masih belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dari hasil survey di lapangan diketahui bahwa para petugas kebersihan hanya mengambil sampah dari tong sampah di depan rumah penduduk, sedangkan sampah yang berserakan di jalan perumahan dibiarkan, selain itu pola pengambilan yang sering membuat kotor jalan tanpa dibersihkan atau disapu bekas sampah yang tercecer di jalanan.

Dari hasil penelitian mengenai perilaku pengumpul sampah di Kecamatan Pedurungan ini terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi tidak optimalnya pekerjaan mereka, yaitu:

- Kurangnya kesadaran petugas kebersihan akan tugasnya.
- Waktu kerja yang terbatas, sehingga mereka terlihat terburu-buru dalam mengambil sampah.
- Masih kurangnya pendadaran yang diberikan oleh DKP Kecamatan Pedurungan.

- Faktor pemberian upah para warga yang diterima para petugas /pengumpul sampah masih jauh dari UMR, sedangkan resiko pekerjaan mereka besar, karena menyangkut masalah kesehatan.
- Umumnya pekerjaan pengambil sampah ini merupakan pekerjaan sambilan sehingga mereka menjadi tidak focus dengan pekerjaan mereka.

Secara singkat faktor penyebab ini dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut:

TABEL IV.6
FAKTOR PENYEBAB KURANG OPTIMALNYA
PEKERJAAN PENGUMPUL SAMPAH
DI KECAMATAN PEDURUNGAN

No	Faktor Penyebab	Prosentase (%)
1	Kurangnya Kesadaran	7.7
2	Waktu Kerja terbatas	32.95
3	Kurang Pengawasan	9.8
4	Pemberian Upah/Gaji	49.7
	Jumlah	100

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Hal yang paling utama disini adalah masalah gaji para pengumpul sampah yang diberikan masyarakat penghuni perumahan yaitu berkisar antara Rp. 300.000,00–350.000,00 per orang dirasa kurang karena beban hidup yang semakin berat saat ini. Oleh karena itu pekerjaan pengumpul sampah ini merupakan pekerjaan sampingan mereka. Sedangkan pekerjaan mereka yang lain ada yang sebagai pedagang di Pasar dan ada yang sebagai buruh bangunan.

Sedangkan pendapat masyarakat tentang optimalisasi pekerjaan dari pengumpulan sampah oleh petugas pengumpul sampah adalah dengan cara mengotimalkan kesadaran para pengumpul sampah akan tugas mereka sebesar 70 % dan peningkatan upah atau gaji para petugas sebesar 30%. Pendapat masyarakat penghuni perumahan ini dapat dilihat lebih jelas pada tabel IV.7 berikut:

TABEL IV.7
PENDAPAT MASYARAKAT PENGHUNI PERUMAHAN
UNTUK OPTIMALISASI PEKERJAAN PENGUMPUL SAMPAH.

No	Program Kerja DKP Kecamatan Pedurungan	Prosentase (%)
1	Optimalisasi Pengumpulan Sampah	70 %
2	Peningkatan Upah	30%
	Jumlah	100 %

Sumber: Hasil Analisis, 2005

4.2.3.2. Analisis Faktor Sosial, Ekonomi Masyarakat

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dari warga perumahan sangat mempengaruhi dalam peningkatan Persepsi berupa kesadaran terhadap upaya pengelolaan persampahan. Hal ini terlihat dalam hasil penelitian dimana dari keenam perumahan yang menjadi obyek penelitian, ada empat perumahan perumahan yang mayoritas penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi (S1) yaitu Perumahan Graha Mutiara Semarang, Gria Medoho Asri, Gria arteri sari, Perumahan Pedurungan Baru memiliki kesadaran bersih lingkungan yang cukup tinggi dibandingkan perumahan yang didominasi pendidikan lebih rendah.

b. Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan pada perumahan berbeda-beda, untuk perumahan baru yaitu : Gria Arteri sari, Gria Medoho Asri, Graha Mutiara Semarang didominasi oleh wiraswasta dan karyawan perusahaan swasta. Tingkat pendapatan mereka juga lebih dari Rp.500.000,00 sebulan. Dengan gaji seperti itu, maka kontribusi untuk pengelolaan sampah menjadi lebih mudah.

Perumahan Baru lebih mahal iuran karena tingkat sosial ekonomi warganya lebih tinggi dari perumahan lama, hal ini juga dipengaruhi oleh harga rumah yang dijual.

4.2.3.3. Analisis Peran serta Pemerintah.

Terdapat dua faktor sebagai akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tuntutan dalam pengelolaan persampahan dengan keadaan pengelolaan persampahan yang ada pada saat ini yaitu:

- Peningkatan kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan persampahan yang tidak disertai dengan peningkatan kinerja manajemen persampahan yang memadai,
- Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh pihak pengelola persampahan, yang dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan.

Oleh karena itu Kepres No. 7 Tahun 1998 dan UU No. 22 Tahun 1999 telah pula membuka peluang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk melibatkan swasta dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan prasarana yang bernilai strategis.

Selain itu peran serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) cabang Kecamatan Pedurungan adalah:

- Memberi penyuluhan tentang K3 di tiap RT.
- Mengadakan bimbingan kepada pengurus / petugas kebersihan
- Mengadakan pengawasan K3 di tingkat Kelurahan
- Pendekatan kepada masyarakat agar memisahkan sampah berbahaya sejak dari sumbernya.

Program yang dilakukan pemerintah kecamatan ini belum dilaksanakan secara optimal oleh masyarakat. Terbukti baru sebagian kecil keluarga yang mempunyai pewadahan dan belum berjalannya system ini secara teratur. Hal ini dapat dimaklumi karena tidak adanya kontinuitas dalam pelaksanaan program.

Masalah pembuangan sampah di lahan kosong milik warga lain pada perumahan Medoho indah menjadi indikator lemahnya pengelolaan TPS di Kecamatan Pedurungan, dan kurangnya kontrol akan cara kerja TPS tersebut oleh pihak pemerintah yang berwenang.

4.3 Temuan Studi

TABEL IV.7

TEMUAN STUDI

No	Aspek Penelitian	Temuan Studi									
1	MENGAPA (WHY) Permasalahan	<p>Pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh sektor informal seringkali tidak memperhatikan beberapa prasarana lingkungan yang ada, seperti fasilitas sosial dan fasilitas umum, antara lain yaitu fasilitas playground, taman, dan terutama fasilitas persampahan. Fasilitas persampahan yang meliputi, pewadahan, pengangkutan, pengumpulan dan pembuangan akhir dari sampah tersebut.</p> <p>Fenomena ini terjadi pada perumahan yang dibangun sektor informal di daerah Kecamatan Pedurungan, antara lain yaitu perumahan Gria Arteri Sari, Medoho Asri, Medoho Indah, Pondok Indah, Pedurungan Baru dan Graha Mukti Asri. Dari latar belakang permasalahan tersebut maka <i>Research Question</i> yang diambil adalah <i>bagaimana upaya masyarakat dalam memenuhi fasilitas persampahan pada perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?</i></p>									
2	WAKTU (WHEN) Awal Pengelolaan Persampahan pada Kawasan Perumahan di Kecamatan Pedurungan	<p>Tabel Awal Pengelolaan Persampahan pada Kawasan Perumahan di Kecamatan Pedurungan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Perumahan</th> <th>Tahun Berdiri Perumahan</th> <th>Awal Pengelolaan Persampahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gria Arteri Sari</td> <td>September 2004</td> <td>September 2004</td> </tr> <tr> <td>Medoho Indah</td> <td>1997</td> <td>1999</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Perumahan	Tahun Berdiri Perumahan	Awal Pengelolaan Persampahan	Gria Arteri Sari	September 2004	September 2004	Medoho Indah	1997	1999
Nama Perumahan	Tahun Berdiri Perumahan	Awal Pengelolaan Persampahan									
Gria Arteri Sari	September 2004	September 2004									
Medoho Indah	1997	1999									

		Gria Medoho Asri	Februari 2004	Agustus 2004
		Pedurangan Baru	2001	2001
		Graha Mutiara	Agustus 2005	Desember 2005
		Pondok Indah	Januari 2001	Maret 2001
Sumber: Hasil Analisis, 2006				
3	PRODUKI SAMPAH	Tabel Produksi Sampah Perumahan Kecamatan Pedurangan Kota Semarang		
		Perumahan	Jml Rmh (Unit)	Jumlah KK/Jiwa
				Produksi Sampah (l/hari)
		Gria Arteri sari	70	30/130
		Medoho Indah	90	75/210
		Gria Medoho Asri	45	30/132
		Pedurangan Baru	101	97/388
		Graha Mutiara	48	28/82
		Pondok Indah	86	74/242
		Total		2.541,9
Sumber: Hasil Analisis, 2006				

Lanjutan Tabel IV.7

4	<p>TINDAKAN (WHAT) Komponen-komponen Pengelolaan Sampah</p> <p>dalam</p>	<p>a) Sistem Pewadahan Sampah</p> <p>Sistem pewadahan untuk perumahan Pedurungan Baru, Pondok indah dan Medoho Indah yang merupakan perumahan yang dibangun sudah cukup lama, jumlah wadah sampah yang ada relatif banyak dibandingkan dengan jumlah rumahnya tetapi kondisi fisiknya kurang baik. Hal ini disebabkan karena faktor umur dan kurangnya perawatan. Sedangkan untuk Perumahan Gria Medoho Asri, Gria Arteri Asri serta Graha Mutiara yang merupakan perumahan baru, jumlah wadah sampah yang ada relatif sedikit dimungkinkan karena penghuni yang ada belum banyak. Kondisi fisik wadah sampah juga masih baik. Namun di sisi lain, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, yaitu masih ada warga yang rumahnya tidak memiliki wadah sampah, hal ini terlihat pada perumahan Medoho Indah. Hal ini antara lain disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kurangnya kesadaran warga akan pentingnya pewadahan sampah, karena sampah yang terbuka dan terkena air hujan akan membusuk dan menimbulkan penyakit karena polusi udara dan lingkungan. – Tidak menyetujui akan iuran yang telah menjadi kesepakatan bersama, karena dinilai terlalu besar dan memberatkan. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa perumahan di Medoho Indah kebanyakan merupakan perumahan dengan kondisi sosial masyarakat menengah ke bawah, yang masih memperhitungkan nilai/biaya yang dikeluarkan setiap kegiatan. <p>b) Pemisahan Sampah</p> <p>Pemisahan sampah ini baru dilakukan oleh sebagian warga di perumahan-perumahan baru, yaitu perumahan Graha Mutiara Semarang, dan Perumahan Gria arteri sari serta perumahan Gria Medoho Asri. Dari pengamatan di lapangan hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kultur masyarakat yang tinggal di tiga perumahan tersebut didominasi oleh warga negara Indonesia keturunan (Tionghoa), yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke atas/di atas rata-rata. – Kondisi fisik dan lingkungan yang bersifat cluster 1 Pintu, dengan harga rumah antara Rp.175 juta–400 juta, menjadikan system pengelolaan sampah lebih terorganisir dan teratur. <p>c) Pemindahan Sampah</p> <p>TPS di Kecamatan Pedurungan kurang terawat dan cenderung hanya menyediakan tempat pembuangan sampah, tanpa memperhatikan bentuk dan fungsinya. Selain itu, kondisi TPS seperti ini membahayakan kesehatan lingkungan dan manusia disekitar TPS tersebut. Untuk proses pemindahan menggunakan transfer depo (120m³), yang berada di wilayah administrasi Kelurahan Tlogosari Kulon dan Pedurungan.</p>
---	---	--

Lanjutan Tabel IV.7

		<p>d) Pengangkutan Sampah</p> <p>Sistem pengangkutan yang ada di wilayah pengamatan memiliki 3 jenis, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pengangkutan dari satu lokasi pemindahan ke tempat pembuangan akhir, – Pengangkutan dari kelompok pemindahan menuju ke tempat pembuangan akhir, – Pengangkutan dengan pola door to door (dari rumah ke rumah) <p>Pengangkutan sampah pada perumahan yang menjadi wilayah penelitian menggunakan gerobak sampah terbuka. Penggunaan gerobak terbuka ini memiliki kelemahan, antara lain adalah sampah mudah terbang saat diangkut menuju TPS (tercecer di jalan), selain itu juga kapasitas angkut yang terbatas, sehingga ada beberapa sampah dari warga perumahan tidak terangkut untuk hari itu, akibatnya sampah menjadi menumpuk di jalan depan rumah.</p>
5	<p>PERSEPSI MASYARAKAT (WHY) Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah</p>	<p>a) <i>Persepsi Masyarakat tentang Sampah</i> Dari hasil kusioner, diketahui bahwa pengertian sampah oleh penghuni perumahan sangat baik, hal ini terlihat dari jumlah jawaban yang 80% menjawab pilihan (d) Barang bekas yang dibuang ditempat yang telah ditentukan. Sedangkan untuk dampak sampah juga diketahui bahwa 50% responden menjawab (e) Tempat berkembangnya bibit penyakit, 30% menjawab (f) mengganggu kesehatan.</p> <p>b) <i>Persepsi Masyarakat tentang Penanganan Sampah</i> Dari penelitian diketahui bahwa warga perumahan 50% merasa sudah mendapat penyuluhan tentang sampah dan 50% belum mendapat penyuluhan. Alasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah karena mereka yang 50% tidak aktif dalam kegiatan di lingkungan perumahan mereka, atau cenderung bersifat individualis. Sedangkan yang 50 % pernah mendapat penyuluhan dari aparat RT/RW di perumahan mereka.</p> <p>c) <i>Persepsi Masyarakat tentang Optimalisasi Pekerjaan Pengumpul Sampah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Kurangnya kesadaran petugas kebersihan akan tugasnya. – Waktu kerja yang terbatas, sehingga mereka terlihat terburu-buru dalam mengambil sampah. – Masih kurangnya pendadaran yang diberikan oleh DKP Kecamatan Pedurungan. – Faktor pemberian upah para warga yang diterima para petugas /pengumpul sampah masih jauh dari UMR, sedangkan resiko pekerjaan mereka besar, karena menyangkut masalah kesehatan. – Umumnya pekerjaan pengambil sampah ini merupakan pekerjaan sampingan sehingga mereka menjadi tidak fokus dengan pekerjaan mereka.

Lanjutan Tabel IV.7

6	<p>PERAN SERTA (WHO)</p> <p>1. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan pada Kawasan Perumahan di Kecamatan Pedurungan.</p> <p>2. Peran Sera Pemerintah</p>	<p>Berdasarkan dari data penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat tentang sampah sudah sangat baik berkisar antara 60–90%. Hal ini terlihat dengan tidak adanya sampah yang menumpuk dan terbuang tidak pada tempatnya di lokasi perumahan, meskipun tidak terkoordinir oleh pihak pengembang, namun kesadaran akan kebersihan menjadikan pentingnya mereka memikirkan masalah pembuangan sampah yang mereka hasilkan sendiri.</p> <p>Terdapat dua faktor sebagai akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tuntutan dalam pengelolaan persampahan dengan keadaan pengelolaan persampahan yang ada pada saat ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Peningkatan kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan persampahan yang tidak disertai dengan peningkatan kinerja manajemen persampahan yang memadai, – Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh pihak pengelola persampahan, yang dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan.
7	<p>Faktor Sosial, Ekonomi Masyarakat</p>	<p>a) Tingkat Pendidikan</p> <p>Tingkat pendidikan dari warga perumahan sangat mempengaruhi dalam peningkatan Persepsi berupa kesadaran terhadap upaya pengelolaan persampahan. Hal ini terlihat dalam hasil penelitian dimana dari keenam perumahan yang menjadi obyek penelitian, ada empat perumahan perumahan yang mayoritas penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi (S1) yaitu Perumahan Graha Mutiara Semarang, Gria Medoho Asri, Gria Arteri Sari, Perumahan Pedurungan Baru memiliki kesadaran bersih lingkungan yang cukup tinggi dibandingkan perumahan yang didominasi pendidikan lebih rendah.</p> <p>b) Jenis Pekerjaan</p> <p>Jenis Pekerjaan pada perumahan berbeda-beda, untuk perumahan baru yaitu: Gria Arteri Sari, Gria Medoho Asri, Graha Mutiara Semarang didomonasi oleh wiraswasta dan karyawan perusahaan swasta. Tingkat pendapatan mereka juga lebih dari Rp.500.000,00 sebulan. Dengan gaji seperti itu, maka kontribusi untuk pengelolaan sampah menjadi lebih mudah.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2006

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Masyarakat yang tinggal di lokasi perumahan merasa mengalami persoalan yang sama yaitu tentang pengelolaan sampah, munculnya ide awal pengelolaan sampah antara satu perumahan dengan perumahan yang lainya bervariasi, yaitu di perumahan pedurungan baru dan Pondok Indah idenya berasal dari pemerintah kelurahan dalam bentuk penyuluhan, sedangkan perumahan Medoho Indah, Medoho Asri, Gria Arteri Sari dan Graha Mutiara ide awalnya berasal dari warga. Meskipun munculnya ide yang mendorong adanya sistem pengelolaan sampah bervariasi, tetapi pelaksanaan pengelolaan sampah antara perumahan relatif sama yaitu di kelola oleh RT dengan sistem iuran warga.

Sampai dilakuan penelitian pelaksanaan pengelolaan smpah dilokasi penelitian masih belum optimal karena masih kurangnya intensitas pengambilan yang dilakukan oleh petugas pengumpul sampah, hal ini karena petugas pengumpul sampah merasa honor yang diterima tiap bulanya masih terlalu rendah.

5.1.1 Kondisi Fisik Perumahan Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

- 1) Pola pembangunan perumahan adalah sama yaitu berupa kelompok-kelompok kecil tetapi tipe ataupun bentuk perumahan bervariasi.
- 2) Tidak semua rumah menyediakan kotak sampah, mereka memasukan timbunan sampahnya ke dalam plastik dan menaruhnya di depan rumah.
- 3) Harga rumah di perumahan mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat penghuninya, hal ini juga berpengaruh pada perilaku terutama mengenai masalah penanganan sampah

- 4) Hunian yang sifatnya masih baru adalah graha Mutiara, Gria Medoho Asri dan Gria arteri sari, penghuni perumahan didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan dan perekonomian menengah menjadikan pola penanganan masalah sampah di wilayah tersebut hampir sudah lebih baik dalam pewadahan, pengangkutan sampah maupun aspek pembiayaan dan pengelolaannya.

5.1.2 Fasilitas Persampahan

- 1) Sampah yang ada di lokasi penelitian adalah jenis rumah tangga
- 2) Pengelolaan persampahan tidak muncul bersamaan dengan berdirinya perumahan-perumahan tersebut, tetapi tergantung dari masalah sampah yang muncul sebagai akibat tidak adanya fasilitas persampahan
- 3) Permasalahan Sampah
 - a) Perumahan yang lama (gria Medoho Indah, Pondok Indah, dan Pedurungan Baru) permasalahan yang muncul adalah system pewadahan yang kurang baik, kondisi wadah sampah yang terbuka, tidak semua penghuni menyediakan tempat sampah, dan adanya pembuangan sampah di lahan kosong pada perumahan tersebut karena beberapa hal :
 - Kondisi sosial budaya penghuni kurang memperhatikan pentingnya tempat sampah.
 - Tidak semua warga mau membayar iuran sampah karena kondisi keuangan dan mereka lebih memilih hemat biaya dengan membakar sampah di lahan kosong/ membuangnya di tempat tersebut

- Jenis wadah sampah tidak ditentukan, sehingga hunian dengan tipe kecil cenderung menggunakan tempat sampah seadanya, dengan kualitas buruk, seperti bak terbuka, keranjang, plastik.
 - Faktor umur dan kurangnya perawatan jenis wadah sampah
 - Sampah terlalu lama di tempat sampah, jadwal pengambilan intensitasnya kurang..
- b) Pada Perumahan baru (Gria medoho asri dan Gria Arteri Sari) masalah yang muncul adalah system pengambilan sampah yang kurang lancar karena :
- Petugas pengambil sampah tidak melaksana kan pengambilan sampah sesuai jadwal.
 - Kapasitas gerobak pengangkut yang terbatas.
- 4) Penggagas/pemberi inisiatif penanganan masalah sampah ditiap perumahan berbeda yaitu warga perumahan itu sendiri untuk perumahan baru dan oleh pemerintah kota untuk perumahan lama.
- 5) Organisasi pengelolaan sampah dibina oleh RT/RW setempat.

5.1.3 Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sampah

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di lokasi perumahan sangat besar karena hampir seluruh persoalan sampah di perumahan memang diatasi secara bersama oleh warga. Mulai dari pembentukan sistem pengelolaan sampai pelaksanaanya di tangani sendiri oleh warga, hal ini didasari oleh adanya pemahaman yang baik dari masyarakat baik mengenai sampah ataupun pentingnya kebersihan

5.1.4 Peran Serta Pemerintah

- Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan sampah, dari rumah tangga sampai ke TPS belum dirasakan langsung oleh warga, karena warga melalui RT secara mandiri mengelola sampah tersebut sampai dengan TPS.
- Semangat hidup bersih yang disampaikan pemerintah melalui lomba kebersihan atau program yang lain mampu meningkatkan kepedulian warga

5.2 REKOMENDASI

- a) Harus ada peraturan yang jelas tentang fasilitas umum persampahan yang harus dibangun oleh pengembang dengan skala kecil
- b) Perlu di buat Sub TPS di lokasi perumahan skala kecil, agar sistem pengelolaanya lebih mudah dan ekonomis
- c) Perlunya ditingkatkan upah petugas pengumpul sampah
- d) Perlu disusunnya program-program yang dapat dilaksanakan RT/RW dalam meningkatkan peranserta masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan.
- e) Perlu diusulkan usaha-usaha untuk menggerakkan dan mendorong peran organisasi dalam masyarakat perumahan (RT/RW) dalam bidang kebersihan.
- f) Perlunya penambahan sarana dan prasarana dalam upaya pengelolaan sampah, seperti truck pengangkut, gerobak sampah dan tong sampah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmadi, Abu. 1999. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amirin, Tatang M. 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Budihardjo, Eko. 1999 *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Alumni.
- Budihardjo, Eko. 1999. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Conyer, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gama Press.
- Danin, Sudarwan. 2000. *Metode Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Perilaku*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ditjen, Perumahan dan Permukiman Dep. Kimpraswil. 2002. *Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan & Permukiman*. Jakarta.
- Dinas Kebersihan Kota Semarang; 2005. *Pengelolaan Kebersihan di Kota Semarang, Kendala Dan Permasalahan Yang dihadapi*.
- Gumbira, Sa'id. 1986. *Sampah Masalah Kita bersama*. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa.
- H.A.S, Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ilhami. 1990. *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia. Edisi Pertama*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Kerlinger, Fred N. 2000. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gama Press.
- Komarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Yayasan REI-PT Rakasindo.
- Marbun. 1994. *Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek*. Jakarta: Erlangga.
- Murdiyanto. 1996. *Pengelolaan Sampah Organik Menjadi Kompos*. Jakarta: Sanitek Konsultindo.
- Nasir M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nurmandi, Achmad. 1999. *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: Lingkaran.
- Outer Bridge, Thomas B. 1991. *Limbat 121 at di Indonesia: Masalah Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: U ess.
- Sumarwoto, Otto. 2004. *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ridwan dan Tita Lestari. 2001. *Dasr-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Rukmana dan Nana. 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*. Jakarta: LP3ES.
- Suratmo, F. Gunarwan. 2004. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sarwono Wirawan. 1992. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Gramedia.
- Sears David, Friedman Jonathan & Peplav Anne. 1985. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Soerjani, Achmad ropiq dan Rozy Munir. 1987. *Lingkungan SumberDaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Jakarta: UI Press.
- Sudarso. 1995. *Pembuangan Sampah*. Jakarta: Depkes.
- Sugiyono. 1999. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Turner, John, FC. 1991. *Freedom To Built*. New York: The Macmillan Company.
- Usman, Husaini dan R. Purnomo Setiady akbar. 2000. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Erna 7 Mukhtar. 2000. *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.
- Wiryanto jomo, Frans. 1986. *Membangun Masyarakat*. Alumni Bandung.
- Yodohusodo, siswono. 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: Unit Percetakan Bharakerta.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Dahlan, Tengku, 2005. “*Persepsi Masyarakat dan Petugas Kebersihan Dalam Upaya Peningkatan Optimalisasi Pengelolaan Sampah Domestik di Kota Tanjung Pinang*”. Tesis Tidak Diterbitkan . Magister Teknik Pembangunan Kota. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Evi, Farah Retnowati, 1998. “*Kriteria Pemilihan Lokasi Perumahan Berdasarkan Preferensi Konsume di Pinggiran Kotamadya Semarang*”. Tugas Akhir Tidak

- diterbitkan. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.
- Suryandari, Yanni, Ida. 1999. *Studi Arahan Lokasi Pembayaran Perumahan di Kota Kudus*. Tugas Akhir Tidak Diterbitkan. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.
- Suwandono, Djoko et antara lain. 1993. *Arahan Lahan Permukiman di Kotamadya Semarang*. Program Studi Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.
- Viatiningsih, Emma. 1997. *Preferensi Pengembangan terhadap factor Penentu Penentu Pemeilihan Lokasi Perumahan di Pinggiran Kotamadya Semarang*. Tugas Akhir Tidak Diterbitkan. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.
- Sudibya, Dani Anta. 2002. *Perilaku Pengumpul Sampah Rumah Tangga Di Kota Depok Kab. Sleman*. Tugas Akhir Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.
- Sunarti, Ni Made. 2002. *Peran serta masyarakat Dalam Pengelolaan sampah Rumah Tangga*. Tugas Akhir Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/PRT/1991 tentang Pedoman teknik Pembangunan Rumah Sangat Sederhana.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.